

**PERANG PROKSI IRAN & ARAB SAUDI DALAM KONFLIK
SEKTARIAN DI SURIAH (2011-2021)
SKRIPSI**



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

RANGGA RIZKHI RAMADHOAN

16323130

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

**PERANG PROKSI IRAN & ARAB SAUDI DALAM KONFLIK
SEKTARIAN DI SURIAH (2011-2021)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

RANGGA RIZKHI RAMADHOAN

16323130

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN
PERANG PROKSI IRAN & ARAB SAUDI DALAM KONFLIK
SEKTARIAN DI SURIAH (2011-2021)

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Gustrieni Putri S.IP., M.A.
- 2 Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.
- 3 Mohamad Rezky Utama S.IP., M.Si.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 16 Agustus 2023



Rangga Rizkhi Ramadhoan

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
Abstrak.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Cakupan penelitian.....	9
1.5 Tinjauan Pustaka.....	10
1.6 Kerangka Pemikiran.....	14
1.7 Argumen Sementara.....	17
1.8 Metode Penelitian.....	17
1.8.1 Jenis Penelitian.....	17
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	18
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	18
1.8.4 Proses Penelitian.....	18
1.9 Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II KONFLIK SEKTARIAN DI SURIAH DAN INTERVENSI IRAN & ARAB SAUDI.....	20
2.1. Konflik Sektarian Di Suriah.....	20
2.2 Dukungan dan Upaya Iran di Suriah.....	25
2.3. Dukungan dan Upaya Arab Saudi di Suriah.....	30
2.4. Kondisi Iran dan Arab Saudi.....	36
2.4.1. Kondisi Ekonomi Iran.....	37
2.4.2. Kondisi Ekonomi Arab Saudi.....	41
BAB III RIVALITAS IRAN & ARAB SAUDI DALAM KONFLIK DI SURIAH BERDASARKAN PERSPEKTIF PERANG PROKSI.....	45
3.1. Agency Problem Iran dan Arab Saudi.....	46
3.2. Risk of Sharing Iran dan Arab Saudi.....	50
3.3. Klasifikasi Model Proksi Iran dan Saudi.....	55
BAB IV PENUTUP.....	59
4.1. Kesimpulan.....	59

4.2	Rekomendasi	62
	DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta kontrol militer di Suriah

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Produksi Minyak Mentah Iran 2011-2022

Grafik 2. Ekspor Minyak Mentah Iran 2011-2021

Grafik 3. Pertumbuhan Ekonomi Iran

Grafik 4. Pengeluaran Militer Iran

Grafik 5. Produksi Minyak Arab Saudi

Grafik 6. Ekspor Minyak Mentah Arab Saudi

Grafik 7. Pertumbuhan Ekonomi Arab Saudi

Grafik 8. Pengeluaran dan Belanja Militer Arab Saudi

Abstrak

Konflik Sektarian di Suriah telah berlangsung lebih dari satu dekade lamanya semenjak pertama kali pecah pada tahun 2011 silam. Konflik ini membenturkan antara kelompok pemberontak yang mayoritas masyarakat Sunni Suriah dengan pemerintah Syiah Alawiyah di Suriah yakni, Presiden Bashar Al-Assad. Dalam dinamikanya, konflik ini juga diwarnai dengan gejolak rivalitas antara dua negara berpengaruh di Timur-Tengah, yakni Iran dan Arab Saudi yang memberikan dukungan serta bantuan terhadap masing-masing kubu yang berbeda. Dan dengan menggunakan teori *Proxy War* oleh Amos C. Fox, di mana dalam dinamika *Proxy War* terdapat dua dinamika hubungan *Principal-Agent*. Di mana faktor *Agency Problems* dan *Risk of Sharing* menjadi dua variabel yang dapat memberikan gambaran dan penjelasan terkait fenomena rivalitas perang proksi antara Iran dan Arab Saudi di Suriah.

Kata Kunci : Timur-Tengah, Arab Spring, Konflik Sektarian, Suriah, Iran, Arab Saudi, Perang Proksi.

Abstract

Sectarian conflict in Syria has been going on for more than a decade since it first broke out in 2011. This conflict pits the Sunni-majority Syrian rebels against the Shia Alawite government of President Bashar Al-Assad. In its dynamics, this conflict is also colored by the turmoil of rivalry between two influential countries in the Middle East, namely Iran and Saudi Arabia, which provide support and assistance to each different side. And by using the Proxy War theory by Amos C. Fox, where in the Proxy War dynamics there are two dynamics of the Principal-Agent relationship. Where the Agency Problems and Risk of Sharing factors are two variables that can provide an overview and explanation of the phenomenon of proxy war rivalry between Iran and Saudi Arabia in Syria.

Keywords : Middle East, Arab Spring, Sectarian Conflict, Syria, Iran, Saudi Arabia, Proxy War.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Timur-Tengah merupakan satu dari sekian banyaknya wilayah di dunia yang saat ini selalu diwarnai oleh konflik dan pertikaian. Wilayah yang selalu menjadi pusat perhatian dunia akibat situasi yang begitu kompleks, sebut saja konflik yang masih terus berlangsung sampai saat ini yang terjadi di beberapa negara seperti Suriah, Irak, hingga Yaman. Kondisi dan situasi konflik pun beragam, mulai dari kudeta, invasi, perang saudara, terorisme, hingga persaingan dan perebutan pengaruh memenuhi hampir seluruh wilayah Timur-Tengah. Yang di mana menyebabkan ketidakstabilan dan tantangan kehidupan pada aspek politik, sosial dan ekonomi. Di tambah, Timur-Tengah juga merupakan panggung bagi dua negara seperti Iran dan Arab Saudi memperebutkan kepentingan dan ambisi masing-masing dalam serangkaian skema perang proksi yang dimainkan (UBRIACO 2017, 2).

Perang proksi sendiri merupakan istilah yang menggambarkan situasi di mana ketika dua negara dengan kekuatan dan pengaruh besar menggunakan negara atau wilayah lain yang sedang berkonflik sebagai medan pertempuran. Hal ini dilakukan semata untuk menghindari konfrontasi secara langsung antara kedua negara, yang dapat menimbulkan dampak kerusakan yang fatal terhadap negara masing-masing. Contohnya sendiri dapat ditemukan di sepanjang dataran wilayah Timur-Tengah, di mana Iran dan Arab Saudi bersaing dalam pola persaingan perang proksi di beberapa wilayah dan negara Timur-Tengah dengan memberikan

dukungan dan bantuan terhadap kubu yang saling dibela (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 2020).

Rivalitas kedua negara selama dekade terakhir menjadi salah satu faktor utama dalam memahami kondisi Timur-Tengah saat ini. Sebagai pemimpin GCC (*Gulf Cooperation-Council*), Arab Saudi memiliki sejarah yang cukup panjang dalam upaya menetapkan dominasi negaranya di wilayah ini. Sementara disisi lain, Iran juga tidak ketinggalan menegaskan pengaruh serta upaya dominasi kepemimpinan mereka dalam berbagai permasalahan yang terjadi. Ketegangan dan persaingan kedua negara dalam mencapai ambisi masing-masing memberikan dampak yang cukup besar dan mendalam. Sehingga mengakibatkan terjadinya peningkatan ketidakstabilan regional, memburuknya konflik sektarian, hingga perang proksi dan intervensi yang kian meluas ke dalam wilayah Timur-Tengah (Marcus 2019).

Kompleksitas persaingan antara Iran dan Arab Saudi sejatinya syarat akan elemen sektarianisme yang kuat dan mendalam. Keduanya bahkan telah lama saling terlibat dalam ketegangan di mana Iran dengan mayoritas pengikut Syiah dan Arab Saudi dengan mayoritas pengikut Sunni. Perbedaan ini kemudian seakan menjadi pemicu dan dorongan dalam berbagai rangkaian permasalahan yang sedang berlangsung, termasuk perang saudara yang terjadi di beberapa negara seperti Suriah, Irak dan Yaman. Bahkan, baik Iran dan Arab Saudi sendiri saling menuduh satu sama lain sebagai aktor yang bertanggung jawab dalam upaya yang menghasut terjadinya konflik sektarian dengan upaya pendanaan serta persenjataan kelompok-kelompok yang bertikai dalam konflik di negara-negara tersebut (Fisher 2016).

Berdasarkan KBBI, sektarianisme merujuk pada konflik antara kelompok agama, etnik hingga entitas politik yang memiliki perbedaan paham, nilai, prinsip dan identitas. Dalam konteks pembahasan ini, sektarianisme lebih mengerucut kepada perilaku diskriminasi, permusuhan hingga kekerasan yang ditujukan kepada satu entitas individu maupun kelompok yang dirasa mempunyai perasaan superior maupun inferior antara satu dengan yang lain. Perbedaan paham dan cara pandang yang telah begitu mengakar bahkan semenjak ribuan tahun lamanya, membuat hubungan antara kelompok Sunni dan Syiah sering sekali selalu berakhir dengan perang saudara (KBBI).

Di Suriah sendiri isu sektarian digunakan sebagai daya dorong tambahan atas konflik yang masih terus berlangsung pasca munculnya fenomena Arab Spring ditahun 2011 silam. Mayoritas kelompok Islam Sunni melakukan serangkaian aksi gelombang protes dan demonstrasi menuntut rezim yang berkuasa, yakni, Bashar Al-Assad, seorang keturunan Islam Syiah Alawi untuk mundur setelah berkuasa hampir 20 tahun lamanya. Kelompok Islam Syiah Alawi sendiri merupakan satu dari sekian banyaknya cabang kelompok Syiah yang sangat mengagungkan sosok Ali bin Abi-Thalib, sepupu sekaligus menantu nabi Muhammad SAW. Dan merupakan kelompok minoritas di Suriah yang berkontribusi sekitar 12% hingga 15% dari total populasi, namun memiliki pengaruh dan kendali yang kuat terhadap mayoritas sektor pemerintahan dan militer di Suriah (Alpert 2012).

Dan dalam perkembangannya, konflik sektarian yang terjadi di Suriah bermula ketika penangkapan yang dilakukan pemerintah Suriah terhadap sekelompok remaja di bawah umur di kota Daraa, setelah sebelumnya aksi mencoret tembok dengan gambar serta tulisan anti pemerintah dan dukungan

terhadap gerakan Arab Spring dilakukan oleh kelompok tersebut. Yang akhirnya menyebabkan terjadinya gelombang unjuk rasa di sepanjang kota Daraa, menuntut dibebaskannya remaja yang tertangkap serta seruan mundur ditujukan kepada Presiden Bashar Al-Assad. Unjuk rasa yang berlangsung damai selama tiga hari tersebut justru berubah mencekam setelah pihak keamanan dan militer pemerintah Suriah mulai bersikap represif dengan melepaskan sejumlah tembakan untuk membubarkan unjuk rasa tersebut. Hasilnya, puluhan hingga ratusan rakyat Suriah terbunuh selama periode awal gelombang Arab Spring di Suriah berlangsung (ALJAZEERA 2018).

Langkah represif yang ditunjukkan pemerintah Assad dalam upayanya merespons serta mencegah gelombang unjuk rasa meluas ke berbagai wilayah, hanya menyulut konflik bersenjata yang tak terhindarkan. Sejumlah pembelot dari kalangan tentara dan militer Suriah, bersama sejumlah rakyat sipil membentuk sebuah kelompok pembebasan Suriah yang disebut *Free Syrian Army* (FSA), guna melawan kelompok penumpasan militer dari pemerintah Suriah. Dikatakan setidaknya bahwa, keberadaan FSA selama periode awal konflik bersenjata di Suriah berlangsung, kelompok ini cukup berperan penting dalam berbagai upaya perlawanan dan pembebasan wilayah Suriah terhadap kendali pemerintah Assad. Di mana setidaknya peranan tersebut berupa, penaklukan serta perebutan sejumlah wilayah di bagian utara dan selatan Suriah, penaklukan secara militer dengan berhasil merebut tempat-tempat strategis seperti pangkalan militer, logistik serta gudang senjata yang kemudian memberikan dampak moral yang signifikan terhadap perjuangan kelompok ini melakukan serangkaian perlawanan

menggulingkan pemerintahan Assad dan membangun pemerintahan yang lebih inklusif dan demokratis (O'Bagy 2013).

Sejatinya dorongan kelompok pemberontak di Suriah didasari atas keinginan untuk membentuk pemerintahan yang inklusif, yang memberikan suara kepada semua warga negara, tanpa memandang latar belakang etnis atau agama. Namun kemudian dimensi serta dinamika sektarian antara Sunni dan Syiah dijadikan instrumen penting oleh Pemerintah Suriah untuk kemudian sengaja mengupayakan konflik sektarian dilakukan di negaranya. Selain bertujuan memecah dan membenturkan kelompok Sunni dan Syiah, hal ini juga untuk memberikan semacam situasi yang menguntungkan bagi pemerintah Suriah dalam melakukan langkah-langkah strategis menghalau kelompok pemberontak. Salah satunya dengan taktik pergantian demografi dari masyarakat Sunni ke Syiah melalui skema yang disebut *The Naame Shaam campaign* (Youssef 2015).

Kemudian, sebagaimana konflik bersenjata kian memanas dan menyebar luas di berbagai wilayah Suriah, intervensi pihak luar ikut meramaikan suasana konflik yang terjadi. Dengan negara-negara seperti Iran mendukung pemerintahan rezim Assad, dan Arab Saudi serta negara teluk arab lainnya mendukung kelompok-kelompok pemberontak militan Islam Sunni seperti FSA. Skema intervensi dengan memainkan pola perang proksi antara Iran dan Arab Saudi dalam konflik bersenjata dan perang saudara yang syarat akan isu sektarian di Suriah dapat dilihat dengan bagaimana, kecenderungan Iran datang membela dan memberi dukungan kepada pemerintah berkuasa Bashar Al-Assad yang merupakan tokoh pemimpin Syiah Alawi di Suriah. Hal ini dilakukan selain karena adanya ambisi ekspansi pengaruh politik yang kuat, hubungan Iran dan Suriah digambarkan cukup dekat dikarenakan

keduanya memiliki kedekatan strategis yang sama terkait isu Palestina. Di mana bersama kelompok Hizbullah di Lebanon, Iran dan Suriah tergabung dalam satu kelompok kecil yang di sebut "*Axis of Resistance*" yang memiliki tujuan politik melawan pendudukan Israel terhadap Palestine dan pengaruh negara-negara Barat di wilayah Timur-Tengah (Badawi 2018).

Sementara itu, Arab Saudi terlibat dalam berbagai upaya bantuan kepada kelompok-kelompok pemberontak bersenjata sejak awal konflik berlangsung. Bersama dengan negara-negara teluk Arab (GCC) lainnya seperti Qatar dan Turki, Arab Saudi memberikan bantuan berupa pendanaan, senjata, hingga bantuan logistik kepada kelompok-kelompok pemberontak melawan pemerintahan Assad. Kepentingan Arab Saudi ikut terlibat dalam konflik sektarian di Suriah dapat dilihat sebagai bentuk upaya Arab Saudi menghalau perluasan pengaruh politik Syiah di negara tersebut. Mengingat sebagai negara dengan mayoritas Sunni, Arab Saudi sangat mengkhawatirkan keberlangsungan kelompok Sunni di Suriah dan telah berupaya memberikan bantuan terhadap kelompok pemberontak, terutama kelompok pemberontak militan Sunni seperti FSA dengan harapan mampu mengimbangi perlawanan kelompok-kelompok yang berada di kubu pemerintah Assad (Gardner 2015).

Memasuki satu dekade konflik berlangsung, konflik masih jauh dari kata usai dan penderitaan masih terus berlanjut. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh Dewan HAM PBB, setidaknya lebih dari 300 ribu korban jiwa dengan rasio 83 masyarakat sipil diperkirakan meninggal setiap harinya selama awal konflik meletus hingga tahun 2021 (Heather Chen 2022). Sementara itu, pemerintahan Assad di atas kertas berhasil memenangkan pertempuran dengan berhasil

menguasai dan mengambil alih kendali sebagian besar wilayah di Suriah dengan bantuan sekutunya yakni Iran dan Rusia. Lebih lanjut, pada tahun 2021, Presiden Bashar Al-Assad kembali menjabat sebagai presiden Suriah untuk keempat kalinya setelah berhasil memenangkan pemilihan umum secara telak. Kemenangan ini mengisyaratkan bahwa Assad berhasil mendapatkan mayoritas dukungan dari rakyat Suriah dan sekaligus menunjukkan bahwa perlawanan dari kubu pemberontak adalah hal yang sia-sia. Namun demikian, penolakan terus datang baik dari dalam maupun luar Suriah, di mana apa yang dilakukan dan ditunjukkan Assad saat ini tidak lebih dari rangkaian propaganda Assad dan loyalisnya. Sebagaimana di tengah krisis ekonomi yang melanda negara tersebut, tantangan untuk mengembalikan situasi ketidakstabilan terhadap berbagai macam sektor merupakan satu hal yang menantang yang harus dihadapi pemerintahan ini. Mengingat mata uang Lira Suriah jatuh sebesar 57% hanya dalam satu tahun pada periode 2020 dan 2021 (Tsurkov 2021).

Konflik yang berkepanjangan selama dekade terakhir mengakibatkan rakyat Suriah dihadapkan dengan situasi kehidupan penuh tekanan dan ketidakpastian di bawah pemerintahan dinasti Assad yang begitu otoriter. Ketidakpastian situasi politik dan kondisi ekonomi yang sulit akibat konflik dan sanksi dari dunia barat hanya menambah penderitaan di tengah masyarakat Suriah. Kerusakan infrastruktur di berbagai sektor hampir seluruh kota di Suriah, terutama infrastruktur penting seperti rumah sakit, sekolah dan perumahan hanya menambah gambaran betapa dampak dari dekade konflik melanda, telah mengubah suatu negara menjadi reruntuhan (Ruth Sherlock 2021). Bahkan dengan intervensi yang dilakukan aktor seperti Iran dan Arab Saudi justru hanya memantapkan kondisi

konflik yang ada. Tendensi kedua negara memainkan isu sektarian sebagai bagian dari elemen perang proksi yang dimainkan hanya menunjukkan betapa tidak ada upaya serius pihak luar menyudahi konflik yang telah memasuki satu dekade tersebut.

Situasi konflik yang beragam, resistensi tiada akhir antara pemerintah dan kelompok pemberontak, serta intervensi dari pihak internal maupun eksternal dalam berbagai macam pergolakan yang terjadi di Suriah, menggambarkan betapa kompleksnya situasi Suriah sampai saat ini. Oleh karenanya, dengan alasan ini penulis merasa tertarik untuk mengangkat isu ini sebagai sebuah topik pembahasan. Mengingat, bahkan setelah memasuki satu dekade konflik berlangsung, upaya-upaya konsensus dan resolusi terhadap konflik ini masih belum mampu menciptakan stabilitas politik di Suriah. Serta adanya rivalitas antara Iran dan Arab Saudi yang memainkan proksi dengan memanfaatkan konflik sektarian, yang mencerminkan perbedaan akan suatu nilai, prinsip dan identitas menjadi satu hal lain yang ingin penulis coba memahami lebih dalam.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun terkait rumusan masalah yang akan penulis coba angkat dari latar belakang di atas ialah **“Bagaimana rivalitas Iran dan Arab Saudi dalam konflik sektarian di Suriah (2011-2021)?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk tujuan penelitian ini sendiri, bertujuan menjelaskan terkait bagaimana rivalitas dan perang proksi antara dua negara yang memiliki pengaruh besar di kawasan Timur-Tengah, yakni Iran dan Arab Saudi terhadap satu dekade

(2011-2021) fenomena konflik sektarian yang terjadi di negara Suriah. Mengingat konflik yang berlangsung satu dekade lamanya ini belum menunjukkan tanda-tanda tercapainya konsensus atas konflik yang berlangsung. Dan juga bertujuan untuk mencapai gambaran dan pemahaman lebih jauh terhadap dua entitas besar dalam kelompok masyarakat Islam, yakni Sunni dan Syiah, yang bagi penulis sendiri merasa memiliki peranan dan aspek pendorong yang cukup kuat terhadap kompleksnya masalah yang ada di kawasan Timur-Tengah, khususnya yang terjadi di Suriah.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa cakupan penelitian berupa batasan waktu, di mana penelitian ini akan lebih fokus pada pembahasan periode awal munculnya Arab Spring di Suriah sekitar tahun 2011 hingga memasuki periode satu dekade konflik berlangsung yakni tahun 2021. Mengingat fenomena konflik yang diakibatkan oleh gelombang Arab Spring pada tahun 2011 ini sendiri masih terus berlangsung. Bahkan setelah berhasil memenangkan pemilihan umum ditahun 2021 dan menjabat kembali sebagai presiden Suriah untuk kali keempat, Bashar Al-Assad belum mampu menciptakan situasi politik dan keamanan yang stabil bagi masyarakatnya. Diperparah dengan situasi ekonomi yang kian memburuk meninggalkan banyak tantangan yang harus dihadapi ke depannya. Isu dan pembahasan pada penelitian ini juga hanya akan fokus terhadap rivalitas dan perang proksi yang dilakukan Iran dan Arab Saudi atas isu sektarian di Suriah. Sehingga pembahasan tidak akan jauh terlepas dari kepentingan dan rivalitas geopolitik serta dinamika yang menyertainya.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pertama, yang berjudul “*Syria as an Arena of Strategic Competition*” (Jeffrey Martini 2013), menjelaskan bahwa bahkan setelah dua tahun fenomena Arab Spring melanda Suriah, negara tersebut akan tetap menjadi arena strategis, setidaknya sebagai arena persaingan antara Iran dan Arab Saudi untuk beberapa tahun ke depan. Kompleksitas konflik yang terjadi di negara tersebut terdeskripsi dengan sangat baik dan terperinci. Penggambaran dua polar dalam konflik antara rezim Assad dan kelompok pemberontak sebagai internal faktor dan dukungan yang diperoleh dari eksternal faktor seperti Iran, Saudi, Rusia dan Amerika, menjelaskan bagaimana kompleksnya situasi di Suriah.

Bahkan kemunculan Amerika dan Rusia yang ikut meramaikan proksi antara Iran dan Saudi juga tidak menunjukkan adanya ketertarikan negara tersebut mengupayakan konsensus terhadap konflik, namun justru hanya menambah anarki terhadap gejolak politik yang di mana terjadi bukan hanya di Suriah, namun di keseluruhan daratan Timur-Tengah. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya kepentingan yang terlalu dipaksakan ke dalam konflik sektarian tersebut. Setidaknya dalam tinjauan ini terdapat banyak kesamaan dengan isu yang ingin penulis bahas. Namun kemudian penulis merasa perlu adanya pembaharuan, mengingat tinjauan penelitian ini dipublikasikan pada tahun 2013, sementara konflik sendiri masih terus berlangsung dan telah memasuki periode satu dekade.

Tinjauan kedua, dengan judul “*Sectarian and Regional Conflict in the Middle East*” (Reese 2013), membahas bagaimana sektarianisme dan rivalitas regional Arab Saudi dan Iran memberikan dampak terhadap dinamika politik dan keamanan wilayah Timur-Tengah. Faktor-faktor seperti konflik sektarian,

geopolitik hingga ekonomi menjadi latar belakang analisis rivalitas Arab Saudi dan Iran di negara-negara kawasan seperti Suriah atau Yaman. Secara keseluruhan, tinjauan ini menekankan bahwa perlu adanya pemahaman terkait sejarah dan budaya terhadap perpolitikan di Timur-Tengah. Hal ini guna memahami situasi kompleks konflik di kawasan tersebut, serta guna ditemukannya solusi yang efektif. Walaupun terdapat kesamaan atas topik yang dibahas, namun mengingat tinjauan ini dipublikasikan tahun 2013, penulis kembali merasa perlu adanya pembaruan terkait isu atau topik pada pembahasan ini.

Tinjauan ketiga dengan judul "*Sectarianism and Conflict in Syria*", (Phillips 2015) muncul dengan menantang narasi, apa yang terjadi di Suriah sebagai sebuah konflik sektarian. Tinjauan ini lebih setuju menyebutnya sebagai sebuah konflik semi-sektarian, dengan menjelaskan bahwa tidak seluruh konflik yang terjadi di wilayah Suriah terjadi atas adanya dorongan sektarian. Banyak faktor pendorong lainnya yang menyebabkan situasi menjadi begitu kompleks. Kemudian dengan mempertanyakan bagaimana sebenarnya munculnya sektarianisme dan perang saudara yang terjadi. Tinjauan ini menekankan terhadap perkembangan identitas politik yang terjadi di Suriah, baik dalam cakupan nasional maupun sektarian, telah berkembang dan menjadi begitu kompleks dan saling berkaitan terhadap kondisi dunia modern saat ini, di mana perkembangan konflik sektarian saat ini merupakan hasil dari perubahan secara struktural, ekonomi, sosial budaya dan politik jangka pendek maupun jangka panjang daripada sebagai suatu hasil dari permusuhan yang telah begitu mengakar dari ribuan tahun yang lalu.

Terlepas menolak menyebut konflik Suriah sebagai sebuah konflik sektarian sepenuhnya, dan lebih cenderung menyebut sebagai sebuah semi-

sektarian. Pada tinjauan ini tidak juga kemudian menafikan bahwa apa yang terjadi di Suriah saat ini tidak terlepas adanya dorongan sektarian yang digunakan oleh aktor-aktor dominan, yakni rezim dan pemberontak. Yang kemudian penulis meyakini bahwa isu sektarian merupakan satu dari sekian banyak faktor penting yang mendorong perkembangan arah konflik. Lebih lanjut, perlu adanya pembaharuan terkait topik ini mengingat jurnal ini dirilis pada tahun 2015.

Tinjauan keempat, dengan judul "*The Regional Geo-sectarian Contest over the Gulf*" (KADDORAH 2018), menggambarkan tentang bagaimana rivalitas geo-sektarian antara negara-negara teluk yang dipimpin Arab Saudi menghadapi penyebaran pengaruh Iran, dengan menganalisis faktor-faktor seperti konflik sektarianisme, konflik regional di Timur-Tengah, serta ambisi pengaruh dan kekuasaan antara Arab Saudi dan Iran. Lebih lanjut, dalam tinjauan ini juga menjelaskan bagaimana dampak dari rivalitas antara negara tersebut terhadap stabilitas kawasan, termasuk terhadap upaya konsensus atas penanganan konflik yang terjadi di beberapa negara, salah satunya Suriah. Mengingat betapa pentingnya menemukan solusi atas konflik melalui dialog dan jalur diplomasi, daripada dengan terus melakukan pendekatan agresif secara konflik militer.

Secara keseluruhan, pembahasan terkait rivalitas antara Arab Saudi dan Iran memiliki arah pembahasan yang sama dengan penelitian yang ingin coba penulis bahas. Serta faktor-faktor menyertainya, seperti konflik sektarian yang dijadikan sebagai satu dari beberapa instrumen dalam upaya kedua negara mencapai tujuan dan ambisi geopolitik masing-masing. Sehingga penulis merasa, pembahasan terlalu terfokus pada berbagai upaya strategis kedua negara terhadap kebijakan geopolitik masing-masing, yang kemudian tidak begitu menyoroti persoalan

sektarian yang terjadi, khususnya di Suriah. Adapun pembahasan yang menyebutkan soal konflik yang terjadi di Suriah, penulis merasa tidak begitu didalami dan hanya dijelaskan secara umum dan ringkas. Yang di mana menjadikan hal ini pembeda terhadap apa yang ingin penulis coba bahas dalam penelitian ini.

Tinjauan kelima, yang berjudul "*The Saudi-Iranian Rivalry: An Ominous zero-sum Game for Supremacy*", (Patrick van der Heiden 2018), menggambarkan secara jelas dan mendalam tentang rivalitas geopolitik Arab Saudi dan Iran. Serta menekankan terhadap tantangannya bagi stabilitas kawasan dan kepentingan internasional di kawasan Timur-Tengah. Ambisi beserta alasan kedua negara untuk menjadi poros dunia Islam dan menjadi satu negara yang dominan ter-gambarkan cukup. Fokus penelitian juga sedikit menyinggung negara-negara seperti Suriah dan Yaman yang dijadikan panggung proksi kedua negara yang kemudian disebut sebagai contoh dari fenomena perang dingin yang ada di kawasan Timur-Tengah.

Fokus penelitian yang penulis rasa begitu umum dan luas dengan membahas kawasan Timur-Tengah secara menyeluruh membuat hal ini menjadi alasan pembeda atas apa yang ingin penulis bahas pada penelitian ini. Lebih lanjut, setidaknya masih banyak tinjauan penelitian di luar sana yang mengangkat topik yang sama dengan topik yang penulis angkat, namun kemudian, mengingat betapa kompleksnya situasi di kawasan tersebut, penulis merasa perlu adanya satu pembahasan yang terfokus hanya pada rivalitas Arab Saudi dan Iran terhadap konflik sektarian di Suriah. Dan juga tentunya sebagai pembaruan terhadap tinjauan-tinjauan terdahulu.

1.6 Kerangka Pemikiran

Amos C. Fox, dalam jurnal artikel “*Strategic Relationships, Risk, and Proxy War*” (Fox 2021), menyatakan bahwa proxy War atau Perang Proksi adalah suatu kondisi di mana dua aktor atau lebih, berperang melawan musuh bersama, serta berusaha mencapai target atau tujuan bersama. Dalam lingkup ruang perang proksi, dikenal istilah aktor “*The Principal*”, aktor atau negara yang merupakan negara utama yang melakukan perang proksi yang di mana dalam pembahasan ini adalah Arab Saudi dan Iran. Kemudian terdapat aktor lain yang di sebut “*The Agent*”, aktor yang berperan sebagai pihak pengganti atas serangkaian upaya proksi yang dilakukan oleh aktor utama, dalam pembahasan ini kelompok-kelompok pro-rezim Assad dan kelompok-kelompok pemberontak di Suriah.

Secara sederhana, sebagaimana dijelaskan bahwa, aktor *Principal* beroperasi secara tidak langsung dengan memberikan arahan serta perintah strategis kepada aktor *Agent* untuk mencapai tujuan strategis atau hanya sekedar membantu kepentingan strategis masing-masing. Namun kemudian dinamika hubungan antara *Principal* dengan *Agent* melekat dua variabel yang disebut *Agency Problems* dan *Risk of Sharing*. *Agency Problems*, adalah situasi di mana ketika terjadi konflik kepentingan antara *Principal* dan *Agent*, di mana secara sederhana keduanya mungkin memiliki agenda prioritas yang berbeda sehingga akan berdampak pada keberlangsungan hubungan proksi yang dilakukan. Sementara itu *Risk of Sharing* adalah kondisi di mana adanya jaminan yang telah disepakati antara *Principal* dan *Agent* untuk membagi risiko terhadap konflik proksi yang dimainkan.

Dengan menggunakan dua variabel di atas sebagai bagian dari kerangka berpikir memahami dan menganalisis fenomena perang proksi, terutama dengan menganalisis *Risk of Sharing* sebagaimana hal ini dianggap cukup berpengaruh dan

menjadi poin penting terhadap interaksi antara *Principal* dan *Agent*. Pakar teori hubungan Internasional, Thomas Schelling mengatakan “*Risiko melahirkan pertanyaan-pertanyaan seperti: risiko apa yang layak diambil, bagaimana kemudian mengevaluasi risiko yang melibatkan suatu tindakan yang diambil, serta risiko memberikan dimensi tambahan atas hubungan militer, yakni suatu manipulasi risiko*” (Fox 2021, 58). Yang ungkapan tersebut kemudian diintegrasikan oleh Fox ke dalam cakupan lingkungan proksi dan ikatan antara hubungan *Principal* dan *Agent*, menghasilkan setidaknya lima model perang proksi sebagai produk akhir dalam memahami fenomena perang proksi. Kelima model tersebut adalah, Eksploitatif, Transaksional, Koersif, Kultural dan Kontraktual.

Model Eksploitatif digambarkan sebagai sebuah hubungan proksi yang di mana *agent* sangat bergantung pada *principal*. Di satu sisi, keberadaan *agent* dianggap sangat penting bagi keberlangsungan kepentingan yang ingin diraih oleh *principal*. Namun *agent* tidak memiliki daya tawar untuk kemudian memaksa *principal* membantu mencapai kepentingan *agent*. *Principal* dapat mengakhiri hubungan proksi secara sepihak jika dirasa *agent* sudah tidak mampu menjaga momentum terhadap kepentingan *principal*. Sehingga dikatakan bahwa hubungan proksi dalam model ini dapat bertahan cukup lama selama strategi dan kebijakan militer di antara keduanya berjalan secara harmoni. Sementara itu dalam Model Transaksional, durasi hubungan proksi antara kedua aktor dapat bertahan selama kepentingan bersama dapat terjamin. Dalam model ini hubungan antara *principal* dan *agent* dianggap setara dan berdasarkan karakteristik kesepakatan bisnis. Hal ini dikarenakan posisi *agent* yang sejatinya tidak begitu bergantung terhadap *principal*

dan hanya berharap bantuan tambahan terhadap tujuan proksi yang ingin dicapai (Fox 2021, 52-54).

Model Koersif memiliki hubungan *principal-agent* di mana komitmen dan kemauan *agent* dalam menanggung risiko dalam pola proksi sangat kecil dan cenderung lemah. *Agent* cenderung dianggap tidak memiliki kemampuan dan enggan menjalankan proksi dari *principal* tanpa kehadiran langsung aktor *principal*. Sehingga dalam model ini, sering kali aktor *principal* harus terpaksa terlibat langsung bersama *agent* untuk mencapai tujuan proksi. Kemudian model kultural, dijelaskan memiliki kesamaan karakteristik dengan model transaksional, hanya saja dalam model kultural hubungan *principal-agent* digambarkan cukup dekat dan kuat dikarenakan adanya ikatan budaya di antara keduanya. Bahkan dikatakan bahwa *principal* tidak ragu untuk kemudian mengambil segala macam risiko terhadap hubungan proksi yang dilakukan. Dan dikarenakan ikatan budaya yang kuat tersebut, proksi dalam model ini juga digambarkan sebagai suatu dukungan proksi yang cenderung berdiri berdampingan menanggung risiko yang besar secara bersama. Dan terakhir model kontraktual, model ini cenderung didorong berdasarkan motif keuntungan dan aktor *agent* dalam model ini secara sadar menerima berbagai macam risiko serta langkah strategis dan taktis yang dapat diupayakan bahkan sebelum terikat dalam hubungan proksi antara *principal* dan *agent*. Dan dikatakan model proksi ini mendominasi fenomena proksi didunia saat ini, hal ini dikarenakan hubungan antara *principal-agent* adalah hubungan antara negara dengan perusahaan penyedia jasa tentara bayaran seperti *Aegis*, *Blackwater* dan *Wagner group* (Fox 2021, 54-58).

Dan dalam pembahasan ini, penulis akan mencoba menganalisis studi kasus yang penulis angkat dengan menggunakan variabel *Agency Problems* dan *Risk of Sharing* yang kemudian akan diklasifikasikan ke dalam salah satu atau lebih dari lima model pola proksi yang sudah dijelaskan di atas.

1.7 Argumen Sementara

Argumen sementara yang bisa penulis berikan saat ini terkait rumusan permasalahan dari isu yang di bahas adalah, bahwa konflik sektarian yang terjadi di Suriah merupakan panggung bagi Iran dan Arab Saudi melakukan skema proksi. Karena baik Iran dan Arab Saudi memiliki satu dorongan atas ikatan persamaan nilai, prinsip dan identitas. Iran yang begitu tendensius terhadap rezim Assad memiliki tujuan agar pemahaman nilai dan entitas kebudayaan Syiah dapat bertahan dan meluas di Suriah. Dengan begitu ambisi Iran menjadi negara paling berpengaruh di daratan Timur-Tengah dapat semakin mudah tercapai, sementara kepentingan Arab Saudi ialah untuk menghalau atau bahkan menggagalkan ambisi Iran tersebut. Namun demikian, tantangan di hadapi oleh Arab Saudi yang di mana, Iran dirasa lebih unggul dalam memenangkan proksi di Suriah. Hal ini terlihat dengan bagaimana Iran lebih berani dalam mengambil risiko atas segala upaya yang dilakukan terhadap kepentingannya dalam memainkan perang proksi di Suriah.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif sehingga penyajiannya cenderung lebih bersifat deskriptif dan analisis. Mengingat sifat ilmu

sosial berdasarkan pada fenomena sosial yang dinamis dan abstrak sehingga tidak memerlukan variabel khusus. Variabel yang dimaksud dapat berupa angka maupun data yang sifatnya statis. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa dalam penyajiannya akan terdapat angka atau tabel yang sifatnya sebagai penguat argumen dalam penelitian ini.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah entitas negara Arab Saudi dan Iran sebagai aktor utama dalam rumusan masalah penelitian. Bagaimana dalam mencapai kepentingan nasional dan pengaruhnya di Kawasan timur-tengah baik Arab Saudi dan Iran melakukan perang yang disebut dengan perang proksi atau *proxy-war*. Beberapa negara di Kawasan ini telah terlibat dalam perang proksi kedua negara, salah satunya Suriah yang merupakan Objek dalam penelitian ini. Yang nantinya dilihat bagaimana pola perang proksi yang dimainkan berdampak terhadap konflik sektarian di Suriah.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus terhadap konflik sektarian dan perang saudara yang terjadi di Suriah selama satu dekade terakhir. Di mana dalam pembahasan ini pada masa awal Arab Spring melanda Suriah.

1.8.4 Proses Penelitian

Penelitian ini menggunakan proses pengumpulan data dengan cara memperoleh data dari sumber primer maupun sekunder, di mana sumber primer

merupakan data berupa laporan resmi dari negara-negara yang menjadi subjek penelitian ini. Sementara data sekunder merupakan data yang diperoleh dari artikel jurnal, berita serta data lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian ini.

1.9 Sistematika Pembahasan

Pada BAB Pertama penulisan ini merupakan pengantar dari keseluruhan pembahasan atas isu atau topik yang diangkat, di mana mencakup Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Kemudian dilanjutkan dengan BAB Kedua, di mana pada BAB ini akan menjelaskan sedikit tentang situasi sektarian yang terjadi di Suriah dan kemudian menjabarkan lebih lanjut terkait bagaimana dukungan serta upaya baik Iran maupun Arab Saudi pada konflik di Suriah dan bagaimana kondisi ini mempengaruhi ekonomi kedua negara. Pada BAB Ketiga, akan dilakukan uji analisis terhadap hasil temuan pada BAB Kedua dengan menggunakan kerangka pemikiran berupa teori Perang Proksi Model Kultural yang digagas oleh Amos C. Fox. Dan BAB Keempat, merupakan BAB kesimpulan yang berisi kesimpulan terkait hasil dari BAB Kedua dan Ketiga.

BAB II

KONFLIK SEKTARIAN DI SURIAH DAN INTERVENSI IRAN & ARAB SAUDI

2.1. Konflik Sektarian Di Suriah

Pada awal kemunculannya, protes yang berlangsung damai pada tahun 2011 sebagai bagian dari efek domino gelombang Arab Spring, telah berkembang pesat menjadi konflik berskala besar antara pemerintah Presiden Bashar Al-Assad, yang mayoritas berasal dari sekte Alawiyah (sebuah cabang dari Syiah), menghadapi pemberontakan yang sebagian besar terdiri dari kelompok-kelompok Sunni yang merasa tidak puas atas sikap diktator yang ditunjukkan oleh rezim penguasa. Dorongan kelompok pemberontak di Suriah tergambar begitu kuat terhadap keinginan untuk membentuk pemerintahan yang inklusif, yang memberikan suara kepada semua warga negara, tanpa memandang latar belakang etnis atau agama. Sebagaimana tindakan otoriter yang diwujudkan oleh Presiden Suriah, Bashar Al-Assad, yang mengendalikan pemerintahan dengan tangan besi, telah memperlihatkan kecenderungan diktator yang membatasi kebebasan sipil, menekan oposisi politik, dan menggunakan kekuatan militer untuk meredam setiap bentuk kritik atau aspirasi reformasi (AlJazeera 2020).

Situasi konflik di Suriah sejatinya lebih kompleks daripada sekadar ketegangan atas perbedaan sektarian antara dua kelompok Sunni dan Syiah. Namun kemudian dimensi serta dinamika sektarian antara Sunni dan Syiah ini telah menjadi salah satu faktor penting serta dorongan yang menyebabkan kondisi perang semakin parah dan meluas. Hal ini tidak terlepas dengan bagaimana rezim Assad

bersikap represif terhadap kelompok-kelompok yang menentanginya. Di kota Homs sendiri, pasca direbut dan dikuasai kembali oleh kubu pemerintah telah menyebabkan penduduk asli kota tersebut yang mayoritas kelompok Sunni harus terusir dan terpaksa mengungsi dari kota kelahirannya. Setidaknya dikabarkan 22 milyar penduduk Suriah yang menjadi pengungsi merupakan kelompok Sunni (The Economist 2018).

Lebih lanjut dijelaskan, hal ini dikarenakan adanya upaya pendekatan yang cenderung berbau sektarian yang di upayakan oleh pemerintah Assad untuk kemudian mengelompokkan dan memecah masyarakat Suriah dengan kelompok pemberontak yang dalam hal ini banyak di dominasi kelompok masyarakat Sunni. Sebagaimana keinginan yang ditunjukkan oleh kelompok pemberontak Sunni untuk menguasai segalanya jika berhasil menggulingkan Bashar Al-Assad menyebabkan ketegangan sektarian dengan kelompok-kelompok minoritas lainnya. Langkah lain yang di ambil oleh presiden Assad dengan membebaskan tahanan-tahanan *Jihadis* kemudian menyebabkan semakin kuatnya ketegangan akan konflik sektarian di tengah masyarakat Suriah. Hal ini dikarenakan adanya kecenderungan para kelompok *Jihadis* untuk memerangi orang-orang di luar kelompok mereka (The Economist 2018).

Terdapat juga isu lain di mana adanya upaya terselubung pemerintah Suriah bersama Iran untuk kemudian melakukan serangkaian upaya untuk mengusir dan mengosongkan beberapa wilayah di Suriah dari kelompok-kelompok Sunni. Dan kemudian wilayah-wilayah tersebut akan diisi kembali dengan masyarakat dari kelompok Syiah Suriah maupun Iran. *The Naame Shaam campaign*, sebuah kebijakan yang dikatakan berperan penting terhadap banyaknya kelompok

masyarakat Sunni Suriah yang terpaksa harus mengungsi dari negaranya sendiri. Kampanye ini menunjukkan adanya upaya dari rezim yang berkuasa untuk menciptakan demografi baru di beberapa wilayah kota yang dianggap strategis, seperti Damaskus dan Homs untuk kemudian terhindar dari elemen-elemen yang tidak diinginkan. Sebagaimana ketakutan yang telah ditunjukkan oleh kubu pemerintah terhadap kelompok masyarakat Sunni sebagai bagian dari kelompok yang mendukung pemberontakan (Youssef 2015).

Selain itu, terdapat sejumlah negara yang turut mengintervensi dan terlibat secara langsung dalam konflik ini, menciptakan situasi yang kian memanas serta kompleks. Beberapa negara di wilayah Timur Tengah, seperti Arab Saudi dan negara-negara teluk lainnya, ikut terlibat dalam serangkaian langkah untuk mendukung kelompok oposisi dan militansi Sunni, sementara Iran disisi lain terlihat memberikan dukungan kepada pemerintahan Assad dan kelompok-kelompok militan Syiah yang berafiliasi pro terhadap rezim Assad. Yang di mana situasi ini menciptakan satu gambaran rivalitas antara kedua negara tersebut yang dilakukan di Suriah. Lebih lanjut ada juga beberapa negara lain seperti Rusia, Turki, Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya yang juga ikut terlibat meramalkan situasi konflik memberikan dukungan dan bantuan terhadap kelompok aliansi masing-masing (SALAMANDRA 2013, 303-305).

Konflik di Suriah melibatkan berbagai kelompok dan aliansi yang berasal dari latar belakang serta membawa agenda kepentingan yang berbeda. Setidaknya konflik ini membagi menjadi empat kelompok kubu yang di mana di antara keempat kubu tersebut memiliki dukungan serta bantuan dari pihak-pihak luar. Kubu pertama terdapat pemerintah Bashar Al-Assad di mana kubu ini dipimpin

oleh Presiden Bashar Al-Assad dan didukung oleh pasukan militer Suriah serta sekutu-sekutu regional dan internasional, seperti Iran, Hizbullah serta Rusia. Kubu ini digambarkan juga terdiri dari kelompok yang diisi mayoritas Islam Syiah. Kubu kedua terdapat kubu yang disebut sebagai kelompok pemberontak bersenjata, kelompok yang dibentuk dikarenakan dorongan untuk menggulingkan pemerintah Assad, kelompok ini terdiri dari mayoritas masyarakat Sunni di Suriah yang kemudian membawa agenda berbeda mengusung tujuan nasionalis, Islamis, maupun demokratisasi. Kelompok ini juga mendapat dukungan dari beberapa negara seperti Arab Saudi dan sekutu negara teluknya, Turki hingga Amerika Serikat (BBC 2017).

Selain itu terdapat juga dua kubu lain yakni kelompok masyarakat Kurdi yang pada saat situasi sedang kacau ikut mengangkat senjata mengasingkan diri dari YPG (*Yekîneyên Parastina Gel*) adalah singkatan dari Pasukan Perlindungan Rakyat. Sebuah kelompok berlatar belakang etnis Kurdi yang berafiliasi dengan Partai Persatuan Demokratik (PYD), sebuah partai politik sayap kiri yang berbasis di wilayah Kurdi di Suriah. YPG juga merupakan bagian penting dari Pasukan Demokratik Suriah (SDF), aliansi yang terdiri dari berbagai kelompok etnis dan agama yang bertujuan untuk melawan ISIS dan menciptakan otonomi di wilayah-wilayah yang mereka kuasai (Perry 2022).

YPG terbentuk pada awal konflik di Suriah dan telah berperan aktif dalam perang melawan ISIS. Mereka menjadi mitra penting bagi pasukan koalisi internasional yang berupaya untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok ekstremis tersebut. YPG juga dikenal karena fokus mereka pada perang gerilya dan memiliki hubungan erat dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), sebuah

organisasi yang beroperasi di wilayah Turki dan telah terlibat dalam konflik sektarian dan etnis di kawasan tersebut. Lebih lanjut juga dijelaskan bahwa kelompok ini mendapatkan dukungan dari beberapa negara, salah satunya Amerika Serikat, dalam upayanya memerangi kelompok teroris ISIS. Namun kemudian keberadaan dan peran mereka di wilayah utara Suriah menyebabkan ketegangan dengan pemerintah Turki. Pemerintah Turki menganggap YPG sebagai cabang dari PKK yang dianggap sebagai kelompok teroris, dan ini menyebabkan satu masalah tersendiri terhadap kompleksnya situasi konflik di Suriah (Mandıracı 2022).

Dan kubu terakhir atau kubu keempat adalah kelompok yang diisi oleh kelompok-kelompok ekstremis dan teroris seperti ISIS dan Al-Qaeda. Yang di mana kehadiran kelompok-kelompok ini dianggap sangat mengganggu terutama dari kubu yang mengupayakan dukungan terhadap kelompok pemberontakan. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik yang ditunjukkan oleh kelompok tersebut dalam serangkaian tindakan yang dianggap begitu ekstrem sehingga mengancam situasi stabilitas dan keamanan di sekitar kawasan Timur-Tengah (Cueto 2021).

Konflik di Suriah telah menjadi panggung pertempuran yang sangat kompleks, melibatkan beragam kelompok dan kubu dengan latar belakang sektarian yang beragam. Tidak hanya terbatas pada pertentangan antara Sunni dan Syiah, perang ini juga melibatkan aktor-aktor lain yang mewakili berbagai aliran politik, etnis, dan bahkan kepentingan serta ambisi individu. Beberapa kelompok mengidentifikasi diri mereka dengan aliran Sunni ataupun Syiah, sementara yang lainnya didorong oleh motivasi atas etnis atau ideologis yang lebih kompleks. Hal ini telah menciptakan gambaran situasi yang rumit, di mana konflik sektarian hanya

merupakan satu bagian dari gambaran yang lebih besar dan mendalam, yang mencakup dinamika politik, sosial, dan budaya di dalam negara ini.

2.2 Dukungan dan Upaya Iran di Suriah

Iran dan pemerintahan Assad di Suriah sejatinya memiliki hubungan aliansi yang cukup stabil selama kurun waktu yang lama. Hubungan ini kian berlanjut dan semakin kuat ketika keduanya menyepakati pakta perjanjian pertahanan strategis pada tahun 2006, yang mengakibatkan terjadinya peningkatan pada kerja sama ekonomi kedua negara. Serta berakibat pada penambahan perjanjian militer dan ekonomi disektor telekomunikasi dan bahan bakar yang nilainya mencapai angka 1 hingga 3 miliar USD. Keterlibatan Iran dan dukungan yang disediakan terhadap konflik di Suriah dapat dikelompokkan ke dalam 4 jenis dukungan yang meliputi dukungan politik, diplomatik, militer dan finansial (OŻAROWSKI 2018, 203).

Dukungan politik dapat terlihat dari keterlibatan Iran terhadap konflik sektarian di Suriah sejak konflik pertama kali pecah pada tahun 2011 silam. Iran secara aktif dan lantang dengan menunjuk seluruh rangkaian konflik militer dan pemberontakan yang terjadi di Suriah sebagai hasil dari propaganda dan konspirasi pihak luar. Yang dalam hal ini secara jelas menunjuk kepada dunia barat dan Arab Saudi Lebih lanjut juga dijelaskan bahwa secara politik Iran menganggap keberadaan Suriah di bawah pimpinan Assad sangat penting, dengan menegaskan dan mengakui legitimasi Bashar Al-Assad sebagai presiden yang sah secara konstitusi, terlepas dari kecaman atas akibat dari konflik yang sedang terjadi (OŻAROWSKI 2018, 206).

Mantan menteri luar negeri Iran, Ali Akbar Velayati, menjelaskan seberapa pentingnya Suriah bagi Iran. Keberadaan Suriah di bawah pemerintahan Assad dianggap sangat penting, mengingat secara tradisional kepentingan Iran di Suriah adalah untuk menjaga koridor pengaruhnya di Timur-Tengah dan sebagai jalur strategis untuk menyediakan suplai senjata kepada kelompok Hizbullah di Lebanon. Yang di mana erat kaitannya terhadap kebijakan luar negeri Iran yang cukup agresif dan konsisten menegancam Israel dan dunia barat. Atau yang populer dikenal sebagai suatu kebijakan *Axix of Resistance* atau *Anti-Israel Resistance*. Kekhawatiran Iran akan kondisi tergulingnya pemerintahan Assad juga hanya akan mengurangi pengaruh dan daya tariknya di kawasan, serta juga mengancam posisi pemerintahan Syiah di Irak yang juga memiliki hubungan erat secara politik, ekonomi, historis dan budaya (Hanjing Yue 2020, 384-385).

Sementara itu, disisi dukungan diplomatik, Iran terlihat mengambil sikap tegas untuk menyatakan dirinya berada pada kubu Pro-Suriah di forum-forum internasional. Di mana secara tegas menentang dunia barat dan termasuk Arab Saudi, Qatar dan Turki yang melakukan intervensi militer di Suriah. Ditambah juga ikut menentang diberlakukannya sanksi "*No-Fly Zone*" dan penangguhan keanggotaan Suriah di OKI. Lebih lanjut juga di sebutkan bahwa keterlibatan aktif Iran dalam mengupayakan perdamaian dan penyelesaian konflik di Suriah mengalami hambatan, terutama dari Amerika Serikat. Di mana pada tahun 2012, di Teheran, dalam pertemuan forum ke-16 *Non-Aligned Movement* (NAM) proposal pertama Iran untuk menangani permasalahan di Suriah tidak diterima setelah sekjen PBB saat itu meminta Iran untuk memberikan jaminan terlebih dahulu atas

komitmennya terhadap kebijakan pengembangan nuklir di negaranya (Marcus George 2012).

Terlepas dari upaya politik dan diplomatik yang mengalami hambatan. Iran juga ikut serta dalam memberikan dukungan militer. Di mana pada tahun-tahun awal konflik berlangsung, komitmen Iran dapat terlihat dengan bagaimana secara konsisten mengirimkan penasihat militer secara langsung ke Suriah. Langkah cepat di ambil pemerintahan Teheran dengan mengirim sejumlah unit pasukan khususnya yang disebut Pasukan Quds dari kesatuan Pasukan Garda Revolusi Islam (Islamic Revolution Guard Corps/IRGC) ke Suriah. Pasukan ini kemudian melakukan perekrutan, pelatihan dan mengorganisir sejumlah milisi lokal untuk berperang bersama tentara militer Suriah yang berada di kubu Assad. Kemauan keras yang ditunjukkan Iran membantu kubu Assad dalam konflik sektarian bersenjata memberikan dampak yang cukup besar terhadap perkembangan situasi konflik ke arah yang lebih menguntungkan pihak pemerintahan Suriah (Azizi 2022, 500).

Ditahun yang sama, kemunculan kelompok militan Hizbullah yang turut meramaikan sekaligus membantu kubu pemerintahan Assad, di mana setidaknya dilaporkan bahwa Hizbullah menurunkan sekitar 4000 hingga 5000 pasukan. Yang kemudian menimbulkan pertanyaan terhadap justifikasi kelompok tersebut untuk ikut terlibat. Hizbullah sendiri merupakan partai politik sekaligus kelompok militer beraliran Syiah yang berbasis di Lebanon (Robinson 2022). Secara sudut pandang geopolitik, keterlibatan kelompok tersebut didasari atas dasar menjaga dan mengamankan dukungan yang didapatkan kelompok tersebut dari Iran. Sebagaimana Iran merupakan negara penyokong terbesar Hizbullah yang sering kali menggunakan kelompok ini sebagai alat proksi mereka. Alasan lain, tentara-

tentara Hizbullah dikirim berperang dengan alasan sebagai bagian dari sebuah bentuk jihad terhadap interpretasi dan kepercayaan mereka sebagai seorang muslim Syiah (Kizilkaya 2017, 211-212).

Selain Hizbullah, kelompok lain yang digerakkan oleh Iran untuk memastikan sekaligus menguatkan posisi dalam konflik berdarah di Suriah. Iran juga menggunakan sebuah satuan kelompok Brigade yang dikenal dengan sebutan kelompok Brigade *Fatemiyoun* dan *Zainabiyoun*, dua kelompok bersenjata non-negara yang disponsori oleh Iran sebagai bagian dari instrumen proksi mereka pada konflik di Suriah. Dua kelompok tersebut dapat dikategorikan sebagai ANSA atau Armed non-state Actors, yang personilnya terdiri dari individu-individu yang berasal dari negara-negara seperti Afghanistan dan Pakistan. Ditambah, peran kelompok ini bergerak sebagai instrumen proksi Iran sangat signifikan terhadap pencapaian pertempuran yang secara strategis menguntungkan di beberapa wilayah kota seperti Aleppo, kota kuno Palmyra, serta wilayah-wilayah selatan dan timur Suriah. Di mana kedua kelompok tersebut berperan sebagai milisi darat pemerintah Teheran, sehingga mengurangi biaya pasukan dan finansial yang harus dikeluarkan Iran dalam konfrontasi militer secara langsung di Suriah (Hamidreza Azizi 2022, 541 & 552).

Mobilisasi kelompok-kelompok di bawah naungan proksi Iran di atas memberikan daya dukung tambahan terhadap berbagai macam kampanye militer yang dilakukan oleh kubu Assad dalam upayanya menghalau dan penaklukan kembali wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh kelompok pemberontak selama periode awal hingga memasuki satu dekade konflik berlangsung. Dan upaya strategis yang dilakukan Iran memobilisasi kelompok proksi di bawahnya dapat

dikatakan cukup berhasil dan membuatnya berada dalam posisi yang diunggulkan dalam persaingannya memainkan skema perang proksi di Suriah.

Selain dukungan dalam bentuk bantuan militer yang dijelaskan di atas, Iran juga secara aktif memberikan bantuan finansial dalam jumlah yang tidak sedikit. Mengingat kondisi ekonomi Suriah pasca konflik dimulai hingga berlangsung sampai saat ini, terus mengalami kemunduran. Ditambah sanksi dan embargo yang dijatuhkan oleh Amerika dan sekutunya membuat Suriah kemudian hanya dapat bergantung kepada Iran. Pada tahun 2013, dilaporkan Iran memberikan bantuan senilai 3.5 milyar dolar Amerika Serikat dalam bentuk utang untuk membeli produk minyak. Hal ini bertujuan untuk setidaknya dapat membantu menopang nilai mata uang Lira Suriah. Dan juga bantuan lainnya dalam bentuk barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan dan obat-obatan yang juga dalam bentuk utang maupun dalam bentuk bantuan langsung. Yang di mana hal ini dilakukan untuk mengurangi kelangkaan yang terjadi akibat konflik yang tak kunjung usai (Terrill 2015, 229).

Selama satu dekade semenjak pecahnya konflik ditahun 2011 silam, Iran menunjukkan berbagai macam upaya yang begitu keras hanya untuk memastikan bahwa presiden Bashar Al-Assad tetap mampu mempertahankan kekuasaannya di Suriah. Dengan berbagai macam bantuan baik dalam bentuk bantuan politik, diplomatik, militer, hingga finansial, semata hanya karena keyakinan bahwa sebuah pemerintahan yang pro terhadap ambisi Iran merupakan kunci terhadap kepentingan nasional Iran. Dan dalam hal ini, menguatkan pengaruh dan posisinya di Timur-Tengah, khususnya terhadap upaya mempertahankan dan menyebar luaskan pengaruh Syiah (Terrill 2015, 226-228).

Namun kemudian, kemunculan entitas global seperti Rusia yang kemudian turut memberikan dukungan terhadap kubu pemerintahan Assad justru hanya menambah kekhawatiran bagi Iran. Walaupun pada dasarnya kehadiran Rusia dalam memberikan kekuatan dan dukungan tambahan kepada pemerintah Assad merupakan satu hal yang menguntungkan baik bagi Iran maupun Suriah. Akan tetapi, hal ini kemudian dapat menjadi rintangan dan hambatan yang dapat dihadapi oleh Iran dimasa yang akan datang, mengingat Rusia memiliki hubungan diplomatik yang cukup baik dengan Israel dan kepentingan Rusia atas konflik di Suriah dapat menjadi ancaman atas ambisi dan kepentingan regional yang ingin dicapai oleh Iran. Dalam hal ini pengaruh, kekuasaan dan sumber daya di Suriah yang bisa sama-sama di kuasai oleh kedua negara (Tan Tan* 2022, 6-9).

2.3. Dukungan dan Upaya Arab Saudi di Suriah

Tidak seperti Iran, kedekatan hubungan Arab Saudi dan Suriah di gambarkan sebagai sebuah hubungan yang kompleks. Secara geopolitik, Arab Saudi melihat Suriah sebagai kunci penting dalam upaya dan ambisinya mendominasi wilayah Timur-Tengah. Kompleksitas hubungan di antara keduanya terjadi dikarenakan banyaknya kejadian dan peristiwa dimasa lalu yang syarat akan ketegangan dan konflik yang melibatkan kedua negara. Di mana Arab Saudi sering kali menyalahkan Suriah, khususnya rezim Assad dalam berbagai upayanya memfasilitasi Iran untuk dapat melakukan intervensi terhadap permasalahan-permasalahan yang terdapat di Lebanon maupun isu Israel-Palestina. Lebih lanjut, pasca arab spring melanda Suriah, Arab Saudi terlihat begitu vokal menyuarakan penolakan terhadap rezim Bashar Al-Assad atas serangkaian tindakan represifnya di Suriah. Termasuk protes kerasnya terhadap terbunuhnya rakyat Suriah pada awal

konflik, yang di mana merupakan berasal dari entitas kelompok mayoritas Sunni (Meskela 2013, 12).

Selain menentang keras apa yang dilakukan rezim Assad, Arab Saudi juga berperan meyakinkan negara-negara anggota Liga Arab untuk kemudian menanggihkan status keanggotaan Suriah, sekaligus mengasingkannya dari berbagai kegiatan organisasi yang beranggotakan 22 negara tersebut. Selain itu, pada awal konflik berlangsung Arab Saudi bersama negara-negara Liga Arab turut kemudian menjatuhkan sanksi serta meminta bantuan PBB untuk menangani sekaligus memberikan tekanan terhadap rezim Assad untuk segera menyudahi rangkaian kekerasan yang dilakukan. Namun kemudian, upaya yang dilakukan tidak diindahkan oleh rezim Assad dan situasi konflik kian memanas tiap tahunnya (Sly, Washington Post 2011).

Selain itu, Arab Saudi juga turut meyakinkan negara-negara teluk dan negara-negara Sunni lainnya, seperti Qatar, untuk ikut membantu menentang pemerintah Bashar Al-Assad dengan memberikan dukungan serta pendanaan terhadap kelompok-kelompok pemberontakan pada konflik Suriah. Upaya Arab Saudi ini bisa dikatakan sebagai suatu upaya propaganda dengan memainkan narasi sektarian terhadap penindasan yang dilakukan rezim Syiah Alawiyah terhadap rakyat Suriah yang mayoritas merupakan kelompok Sunni. Dengan memainkan peran sebagai penyokong kelompok pemberontakan di Suriah, Arab Saudi setidaknya berharap upayanya tersebut dapat kemudian menggulingkan pemerintahan Assad dan mencegah kuatnya penyebaran pengaruh Syiah yang di upayakan oleh Iran (William Young 2014, 3).

Lebih lanjut dijelaskan, pada masa awal konflik terjadi. Arab Saudi dengan mobilisasi dukungannya terhadap kelompok pemberontak moderat seperti *Free Syrian Army* (FSA) mampu memberikan perlawanan dan tekanan yang cukup baik secara militer terhadap kubu rezim yang berkuasa. Namun memasuki lima tahun konflik berlangsung, tantangan harus dihadapi oleh Arab Saudi dan FSA, di mana selama periode tersebut mulai bermunculan kelompok-kelompok pemberontak lain yang bersifat ekstremis dan radikal. Kelompok-kelompok seperti *Hayat Tahrir Al-Sham*, sebuah kelompok konservatif pada tahun 2012, serta *Jabhat Al-Nusra* yang merupakan kelompok cabang dari *Al-Qaeda* di Suriah ditahun yang sama. Serta ditahun berikutnya terdapat kelompok seperti *Islamic Front of Syria* yang merupakan kelompok militan Salaf Sunni, hingga ISIS yang begitu radikal sehingga dianggap sebagai kelompok teroris daripada sebagai sebuah kelompok pemberontak (Erwin van Veen 2021, 18).

Dukungan-dukungan Arab Saudi sebagian besar dilakukan kepada kelompok-kelompok pemberontak di bawah panji bendera *Free Syrian Army*, sebagaimana diberitakan oleh majalah Times, NewYork Times dan Reuters. Arab Saudi dikatakan melalui pihak ketiga membayar sejumlah senjata dan kemudian diselundupkan secara rahasia kepada FSA. Selain itu Arab Saudi juga terlihat meningkatkan bantuan berupa *TOW Anti-Tank Missiles* dari Amerika Serikat. Yang kemudian dikonfirmasi oleh sejumlah laporan NGO bahwa misil anti-tank tersebut mampu menghalau dan memberikan perlawanan sengit terhadap tentara-tentara Pro-Assad sepanjang tahun 2015 (Ellison 2016).

Lebih lanjut, dikatakan bahwa ada indikasi Arab Saudi bekerja sama dengan CIA untuk kemudian melakukan serangkaian operasi bantuan dengan nama kode,

Timber Sycamore. Sebuah bentuk kerja sama yang dianggap sangat strategis di mana Arab Saudi akan bertanggung jawab terhadap pendanaan dan persenjataan, sementara CIA akan bertanggung jawab terhadap pelatihan kelompok pemberontak dalam menggunakan senjata AK-47 dan senjata Anti-Tank. Upaya Arab Saudi ini juga dipimpin langsung oleh pangeran Saudi Bandar bin Sultan yang pada saat itu menjabat sebagai kepala Intelijen Saudi yang kemudian mengarahkan intelijen Arab Saudi untuk membeli banyak pasokan senjata AK-47, beserta jutaan amunisi dari negara-negara Eropa Timur. Peran CIA terlihat membantu sebagai perantara terhadap kesepakatan yang cukup besar terhadap pembelian persenjataan senjata yang dilakukan Arab Saudi di Kroasia pada tahun 2012 (Chivers 2016).

Selain bantuan-bantuan terhadap kelompok-kelompok militan Sunni di bawah bendera FSA. Ada pula dukungan terhadap kelompok-kelompok pemberontak Suriah lainnya seperti kelompok *salafi jihadis* yang disebut *Jaysh al-Islam* dan *Jais hal-Fatah*. Serupa dengan apa yang dilakukan terhadap kelompok lainnya, Arab Saudi juga dilaporkan memberikan pendanaan serta senjata terhadap dua kelompok tersebut sebagai kekuatan tambahan dalam upaya melengserkan presiden Assad. Selain itu terdapat juga peran khusus untuk kelompok *Jaysh al-Islam* yang kemudian secara khusus memiliki peran untuk menghalau dan melawan kelompok-kelompok seperti ISIS dan Al-Qaeda. Namun kemudian dikatakan munculnya kelompok seperti *Jaysh al-Islam* ini justru ikut memberikan hambatan terhadap kelompok pemberontak lain seperti FSA (Ellison 2016).

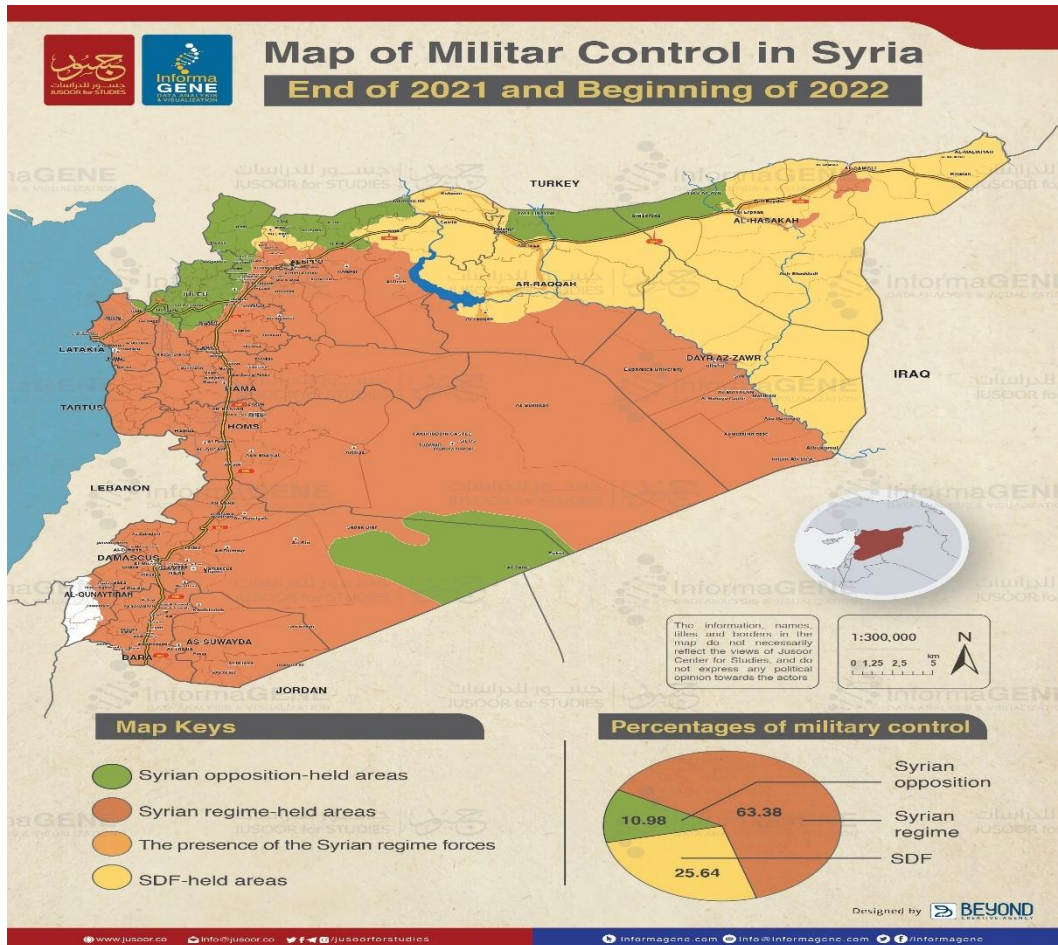
Munculnya kelompok-kelompok di atas dalam meramaikan situasi konflik yang ada menimbulkan gejolak dan ketegangan tersendiri di antara satu kelompok dengan yang lain. Walaupun kemunculan kelompok-kelompok tersebut didasari

dorongan yang sama untuk menentang dan menggulingkan rezim Assad. Akan tetapi, kepentingan yang dibawa serta dukungan yang diperoleh saling tidak sejalan mengakibatkan terjadinya saling lawan dan serang antara kelompok satu dengan yang lain dalam memperebutkan kendali atas wilayah-wilayah strategis di Suriah. Yang di mana hal ini kemudian mengakibatkan situasi yang sebelumnya menguntungkan pihak oposisi atau pemberontak, dapat dimanfaatkan oleh kubu rezim Assad dan sekutunya untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai kelompok pemberontak (Erwin van Veen 2021, 18-19).

Situasi yang tidak menguntungkan ini sejatinya terjadi dikarenakan tidak adanya komitmen bersama antara Arab Saudi dan sekutunya di negara-negara teluk dalam mengupayakan pendekatannya pada konflik di Suriah. Karena sebagaimana diketahui ditahun 2017, Arab Saudi bersama dengan negara sekutu lainnya sempat memutus hubungan diplomatik dengan Qatar atas dasar tuduhan yang diarahkan ke Qatar bahwa negara tersebut melakukan serangkaian dukungan dan pendanaan terhadap kelompok-kelompok ekstremis dan radikal di kawasan yang kemudian dikhawatirkan dapat mengancam posisi internal Arab Saudi. Kelompok yang didanai termasuk salah satunya adalah *Jabhat Al-Nusra* yang merupakan kelompok ekstremis dan radikal Sunni dan berafiliasi dengan *Al-Qaeda* di Suriah (Wintour 2017).

Dan memasuki satu dekade konflik berlangsung. Posisi dan pengaruh Arab Saudi di Suriah kian melemah mengingat kelompok-kelompok pemberontak Suriah yang hampir semuanya berhasil dipukul mundur oleh kubu Assad. Sehingga hanya menyisakan 10.98% wilayah yang saat ini masih di bawah kendali kelompok pemberontak, salah satunya wilayah kota Idlib di bawah kekuasaan kelompok

Hayat Tahrir al-Sham dan daerah *al-Tanf* yang merupakan tempat pangkalan militer Amerika Serikat, yang di mana masih menyisakan setidaknya dua ribuan pasukan US-Army dan sebagian tentara FSA. Yang di mana hal ini tidak terlepas dari kurangnya konsistensi negara-negara penyokong kelompok oposisi dan



pemberontak seperti Arab Saudi, Turki, Qatar hingga Amerika Serikat yang dianggap kurang begitu serius dalam melakukan intervensi menghalau dan memberikan perlawanan secara militer terhadap serangkaian kampanye militer kubu Assad (Erwin van Veen 2021, 7-8).

Gambar 1. Peta kontrol militer di Suriah

Sumber: <https://jusoor.co/en/details/map-of-military-control-in-syria-end-of-2021-and-beginning-of-2022>

Lebih lanjut juga dijelaskan, akibat kebangkitan dan kemunculan kelompok terorisme, yakni ISIS di Suriah. Arab Saudi terpaksa harus mengubah pendekatan

strategisnya terhadap situasi di Suriah, di mana hal ini tidak terlepas dari manuver politik luar negeri negara sekutu Arab Saudi seperti Amerika Serikat dan Turki yang mengutamakan penanganan terhadap kelompok Terorisme, ISIS yang dianggap lebih genting ketimbang menghalau Assad yang tiap tahun makin kuat dan terfokus menguasai kembali sebagian besar wilayah di Suriah. Mengingat situasi yang begitu kacau dengan berbagai macam kepentingan diperebutkan dalam satu negara menyebabkan situasi yang kompleks dan susah terkendalikan. Sehingga wajar kemudian fokus kepentingan kemudian berpindah dengan melakukan apa yang dianggap penting untuk segera ditangani (Todman 2016, 4).

Mengingat dengan sudah dipastikannya Iran memenangi serangkaian perang proksi di Suriah, lantas kemudian tidak membuat Arab Saudi melepaskan Suriah untuk sepenuhnya di bawah pengaruh Iran. Sebagaimana diberitakan akan ada upaya yang akan dilakukan pemerintah Riyadh untuk melakukan pendekatan kembali dengan pemerintahan Damaskus (Ayton 2021). Langkah besar yang harus dilakukan Arab Saudi untuk terus berupaya memastikan Suriah tidak sepenuhnya jatuh ke dalam pengaruh Iran,

2.4. Kondisi Iran dan Arab Saudi

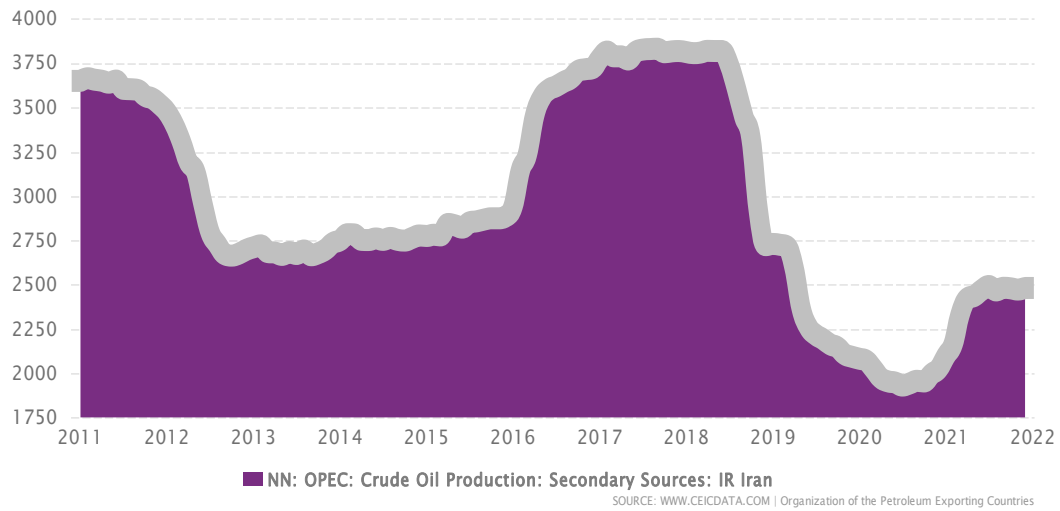
Dalam satu dekade terakhir baik Iran maupun Arab Saudi telah melakukan berbagai macam upaya dan dukungan terhadap konflik sektarian di Suriah. Sehingga kemudian, selama satu dekade terakhir ini pula, kedua negara dapat dikatakan terkena konsekuensi atas serangkaian upaya yang telah dilakukan, terutama pada aspek ekonomi dan militer masing-masing negara.

2.4.1. Kondisi Ekonomi Iran

Melansir pada situs resmi world bank, dikatakan Iran merupakan negara dengan cadangan minyak terbesar kedua di dunia. Sehingga aktivitas ekonomi dan pendapatan negara masih sangat bergantung pada sektor minyak, yang membuat kondisi dan situasi ekonomi menjadi tidak stabil. Hal ini tidak terlepas dari berbagai macam faktor luar, seperti sanksi internasional dan volatilitas harga komoditas. Kemudian adanya kontraksi pasar minyak selama satu dekade terakhir pada periode 2011 hingga 2020 mengakibatkan terjadinya inflasi yang mencapai lebih dari 40% selama empat tahun berturut-turut. Lebih lanjut, pasca pandemi covid-19 dan langkah-langkah mitigasi yang dilakukan berakibat pada membengkaknya utang negara, serta penurunan nilai mata uang akibat sanksi. Dan meningkatnya angka pengangguran juga menambah masalah kesejahteraan di negara Persia (WorldBank 2022).

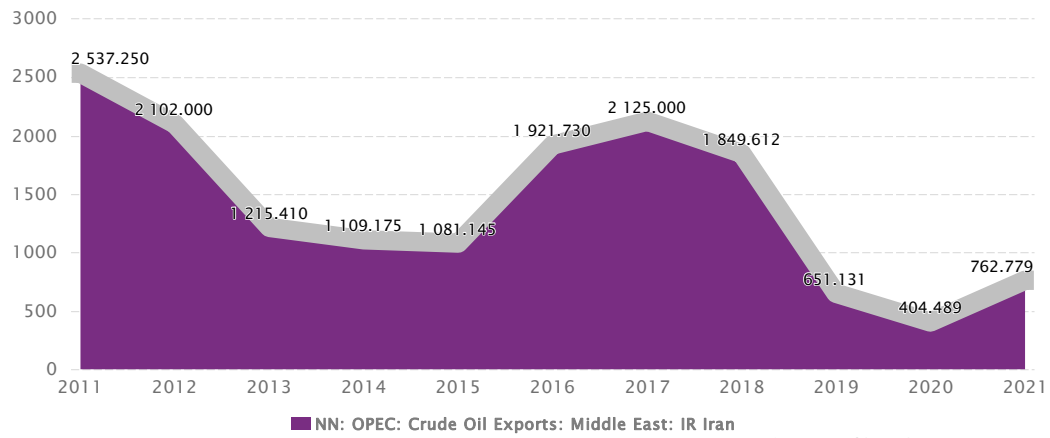
Fluktuasi harga minyak dunia yang cenderung tidak stabil ditambah kondisi geopolitik kawasan pasca arab spring membuat ekonomi Iran kian merosot. Setidaknya produksi minyak mentah Iran tiap tahunnya cenderung mengalami penurunan, di mana semenjak arab spring pecah ditahun 2011, produksi minyak Iran hanya sekitar 2.5 juta barel per-harinya dengan jumlah ekspor hanya berkisar di antara 1.1 hingga 1.2 juta barel rata-rata per-hari, tren ini terus berlangsung setidaknya hingga tahun 2016. Di mana kemudian kondisi ini meningkat dengan ditandai adanya peningkatan pada grafik produksi yang mencapai 3.7 juta barel per-hari dan nilai ekspor yang mencapai 2.1 juta barel per-hari ditahun 2016 hingga awal 2019.

Grafik 1. Produksi Minyak Mentah Iran 2011-2022



Sumber: www.ceicdata.com | Organization of the Petroleum Exporting Countries

Grafik 2. Ekspor Minyak Mentah Iran 2011-2021



Sumber: www.ceicdata.com | Organization of the Petroleum Exporting Countries

Kondisi ini menandai pertumbuhan ekonomi Iran selama periode satu dekade tahun 2011-2021, merupakan yang terendah dalam enam dekade terakhir pasca revolusi di negara tersebut di tahun 1979. Hal ini tidak terlepas dikarenakan kombinasi dari tingginya tingkat korupsi, tata kelola pemerintahan yang buruk serta sanksi internasional yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi hanya mampu mencapai pertumbuhan diangka 0.5%. Banyak pakar ekonomi menilai terhadap periode dekade ini sebagai dekade yang hilang atau sia-sia dikarenakan kurangnya modal investasi, konsumsi sektor swasta yang datar, atau bahkan menurun,

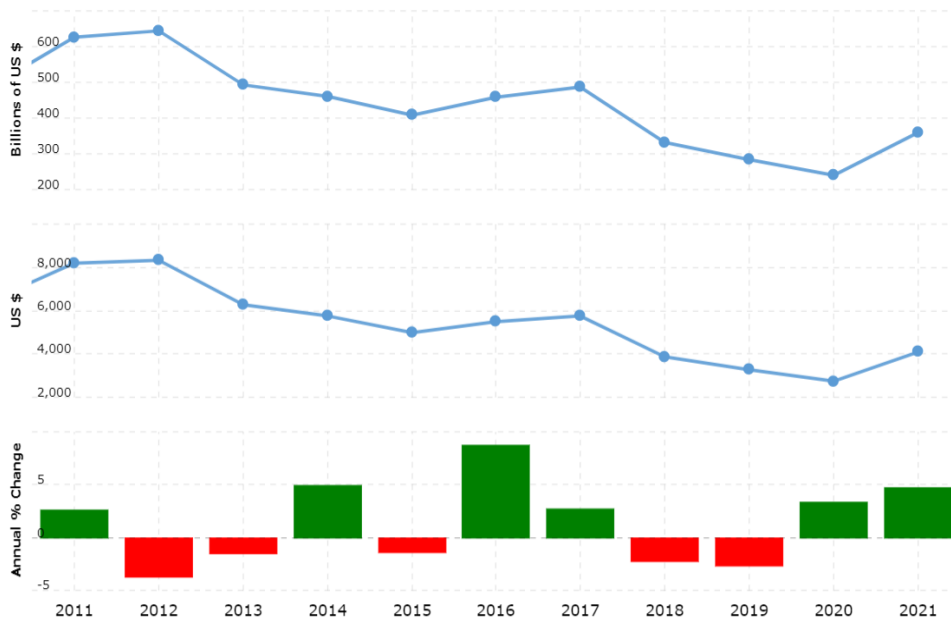
keluarnya sekitar 100 miliar USD modal dari Iran, dan pertumbuhan ekonomi yang buruk (IOD 2021).

Akibatnya Iran harus memikirkan upaya dan langkah strategis untuk memulihkan kondisi penurunan ekonomi yang memberikan dampak begitu besar terhadap situasi dan kestabilan di dalam negerinya. Upaya pengembangan 5 tahun yang dimulai dari tahun 2016 hingga 2021 setidaknya mampu memberikan angin segar ditahun-tahun terakhir, walaupun sempat kembali merosot pasca pandemi covid-19 melanda, namun setidaknya pertumbuhan ekonomi terlihat mulai membaik ditahun 2021 yang di mana berada di tren positif dengan terus mengalami kenaikan (Rome 2021). Dan dilansir dari laman resmi WorldBank, tren ini dapat terus berlanjut apabila mampu menjaga dan menjalankan upaya yang sebelumnya telah dilakukan, yakni terdiri dari tiga pilar pengembangan yang meliputi pengembangan ekonomi yang tangguh, kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta promosi keunggulan budaya. Di mana di antara prioritasnya adalah reformasi badan usaha milik negara dan sektor keuangan dan perbankan, serta alokasi dan pengelolaan pendapatan sektor minyak. Sehingga diperoleh hasil perkiraan berupa pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 8% untuk tahun-tahun selanjutnya (WorldBank 2022).

Lebih lanjut Iran juga perlu melakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan luar maupun dalam negerinya yang melibatkan militer negara tersebut. Mengingat sanksi yang dijatuhkan hingga isolasi dalam pergaulan dunia diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan yang menimbulkan kekhawatiran dan keraguan, seperti program nuklir dalam negeri hingga intervensi dan kampanye militer Iran di berbagai negara di kawasan. Selain menimbulkan kondisi ketidakstabilan di dalam

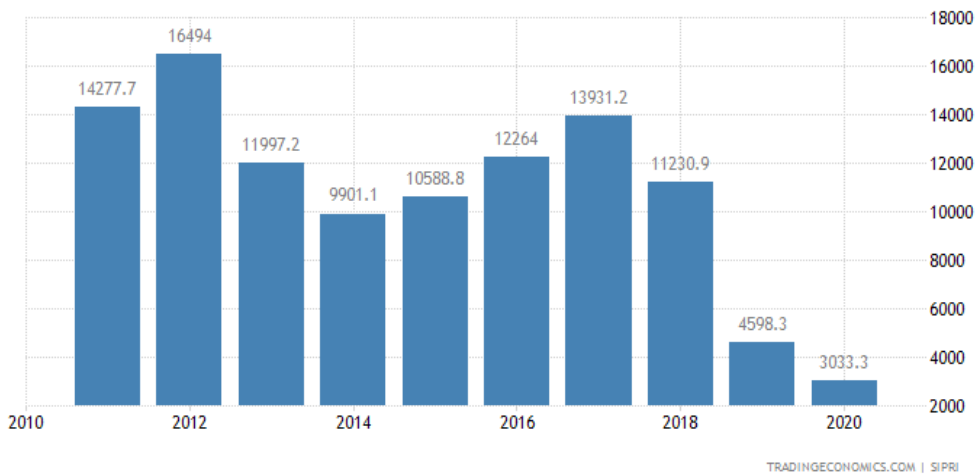
kawasan, hal lain yang perlu menjadi pertimbangan adalah sanksi yang membuat ekonomi Iran kian terpuruk. Anggaran yang telah dikeluarkan untuk mendukung kebijakan-kebijakan militer selama dekade terakhir hanya akan terus memberikan pukulan yang menyakitkan. Terutama pada sektor ekonomi, kesejahteraan sosial dan politik dalam negeri.

Grafik 3. Pertumbuhan Ekonomi Iran



Sumber: World Bank

Grafik 4. Pengeluaran Militer Iran



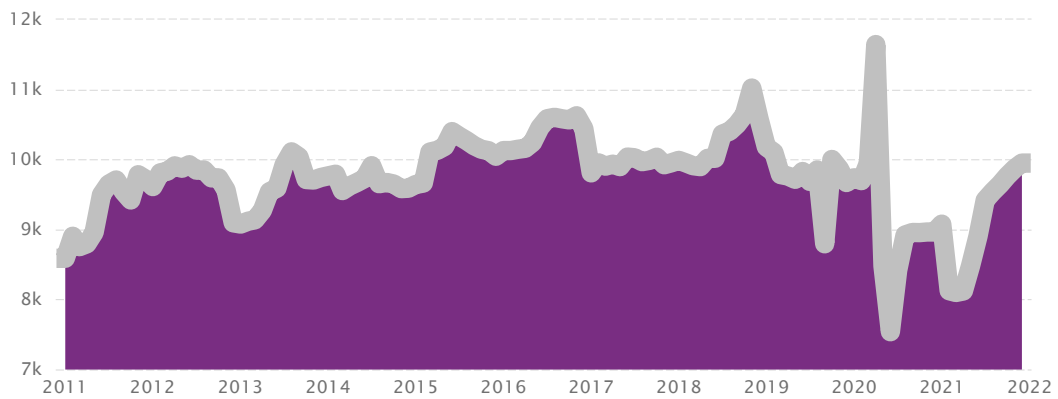
Sumber: Data Trading Economics | [https://tradingeconomics.com/iran/military-](https://tradingeconomics.com/iran/military-expenditure#:~:text=Military%20Expenditure%20in%20Iran%20averaged,updated%20on%20July%20of%202023)

[expenditure#:~:text=Military%20Expenditure%20in%20Iran%20averaged,updated%20on%20July%20of%202023](https://tradingeconomics.com/iran/military-expenditure#:~:text=Military%20Expenditure%20in%20Iran%20averaged,updated%20on%20July%20of%202023)

2.4.2. Kondisi Ekonomi Arab Saudi

Sejatinya kondisi ekonomi baik Iran maupun Arab Saudi tidaklah jauh berbeda. Mengingat Arab Saudi juga merupakan pemain besar dalam industri minyak dunia dengan cadangan minyak mentah yang melimpah. Hal ini menyebabkan Arab Saudi masuk ke dalam daftar negara-negara yang sangat bergantung pada pendapatan ekspor minyaknya. Produksi minyak mentah Arab Saudi didekade terakhir juga lebih unggul dari Iran yang mampu mencapai rata-rata produksi tahunan 8.5 juta barel per-harinya, di mana jumlah ini lebih besar empat kali lipat dari yang dapat dihasilkan oleh rivalnya. Dan juga jumlah ekspor yang cenderung stabil diangka 6.6 juta barel per-hari selama periode tahun 2011 hingga 2021.

Grafik 5. Produksi Minyak Arab Saudi

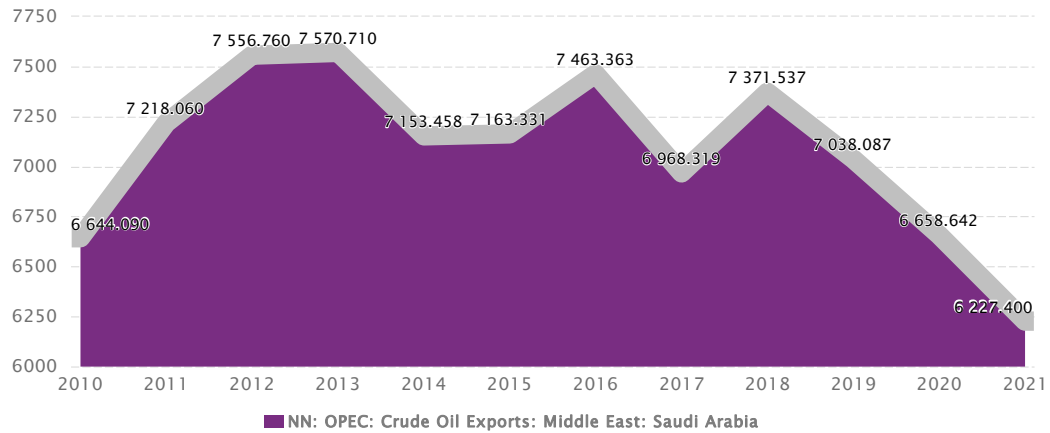


■ NN: OPEC: Crude Oil Production: Secondary Sources: Saudi Arabia

SOURCE: WWW.CEICDATA.COM | Organization of the Petroleum Exporting Countries

Sumber: www.ceicdata.com | Organization of the Petroleum Exporting Countries

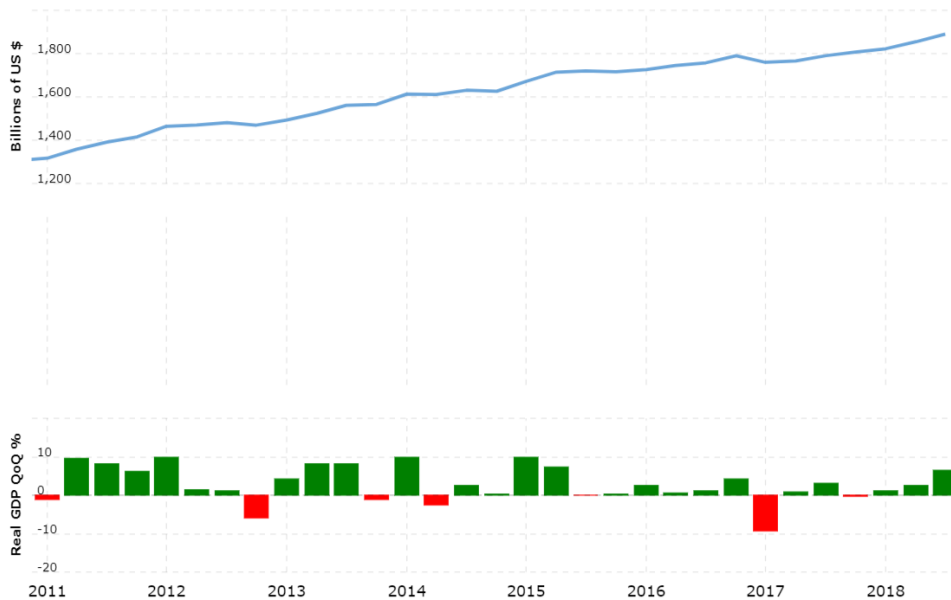
Grafik 6. Ekspor Minyak Mentah Arab Saudi



Sumber: www.ceicdata.com | Organization of the Petroleum Exporting Countries

Dari data dan grafik yang disajikan dapat dilihat dan disimpulkan bagaimana pertumbuhan ekonomi baik Arab Saudi maupun Iran sama-sama mengalami fluktuasi selama satu dekade terakhir, hanya saja Arab Saudi menunjukkan pertumbuhan yang lebih unggul atas Iran dengan kondisi fluktuasi yang cenderung stabil pada angka 2% tiap tahunnya.

Grafik 7. Pertumbuhan Ekonomi Arab Saudi

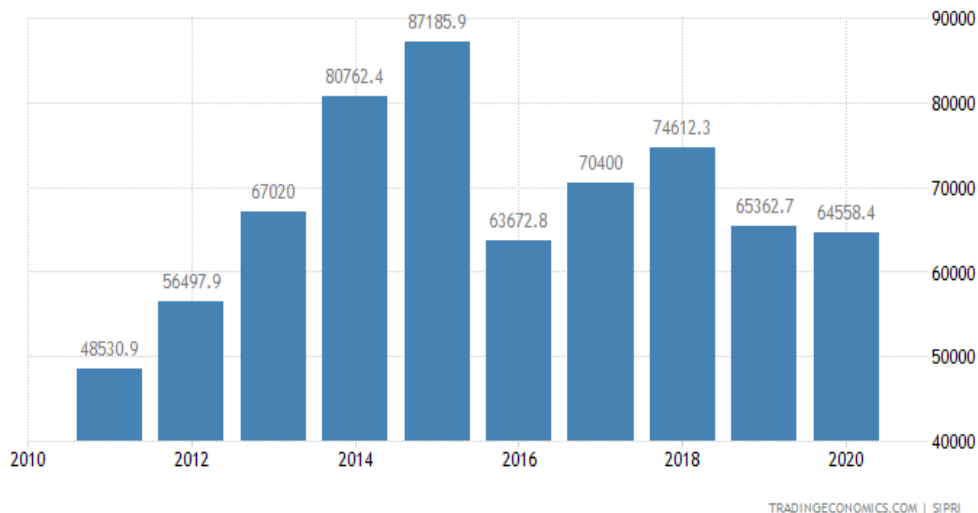


Sumber: World Bank

Besar dan kuatnya kekuatan ekonomi Arab Saudi kemudian dimanfaatkan oleh negara ini untuk kemudian melakukan modernisasi terhadap sektor militernya.

Di mana di antara negara-negara Timur-Tengah lainnya, Arab Saudi masih menjadi negara dengan anggaran belanja untuk sektor militer terbesar. Dengan mitra impor kerja sama persenjataan dan militer ialah Amerika Serikat, Prancis, Jerman maupun Inggris yang terkenal memiliki pabrik dan teknologi persenjataan yang maju. Lebih lanjut langkah agresif Arab Saudi dalam urusan belanja militer ini dapat diartikan sebagai bentuk skeptis negara tersebut terhadap kondisi keamanan Timur-Tengah. Dr Nan Tian, peneliti senior dari *SIPRI's Military Expenditure and Arms Production Programme*, menyatakan bahwa “Peningkatan pengeluaran persenjataan dan belanja militer adalah tanda bahwa kita hidup di dunia yang semakin tidak aman, negara-negara meningkatkan kekuatan militer sebagai respons terhadap lingkungan keamanan yang memburuk, yang mereka perkirakan tidak akan membaik dalam waktu dekat.” (Ferrari 2023).

Grafik 8. Pengeluaran dan Belanja Militer Arab Saudi



Sumber: Data Trading Economics | <https://tradingeconomics.com/saudi-arabia/military-expenditure>

Terdapat perbedaan lain yang dapat dilihat di antara kedua negara di mana selain memiliki persentase populasi pemuda yang cukup besar. Arab Saudi memiliki sekitar 63% dari total populasi, dan Iran sekitar 60% dari total populasi. Jumlah angkatan kerja muda yang dominan semacam ini kemudian menjadi

tantangan tersendiri, di mana baik kelompok pemuda di antara kedua negara sama-sama menuntut dan berharap atas lapangan pekerjaan, pengembangan dalam negeri dan kesempatan untuk menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat internasional (Alotaibi 2023).

Sementara Iran mengalami gelombang unjuk rasa, menuntut reformasi fundamental terhadap sektor politik dan ekonomi dalam negerinya. Arab Saudi cukup positif menyongsong masa depan yang optimis, di mana pemerintah kerajaan di bawah pimpinan putra mahkota Muhammad bin Salman Al-Saud, mencanangkan kebijakan The Saudi Vision 2030, yang berfokus pada pengembangan negara *non-oil country* serta penciptaan lapangan pekerjaan bagi para kelompok usia angkatan kerja muda di negaranya (Alotaibi 2023). Kebijakan ini sejatinya lahir untuk mengeluarkan Arab Saudi dari ketergantungannya terhadap sektor minyak bumi dan mengupayakan terjadinya diversifikasi ekonomi yang di mana hal ini akan berdampak kepada pengembangan sektor usaha lain seperti pariwisata, teknologi, energi terbarukan, dan investasi asing. Lebih lanjut, dengan adanya upaya kebijakan semacam ini Arab Saudi berharap dapat terciptanya kondisi ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Namun demikian, adanya kebijakan Saudi Vision 2030 ini juga tidak membuat Arab Saudi meninggalkan ketergantungannya terhadap pasar minyak dunia sepenuhnya. Arab Saudi masih memiliki pengaruh yang cukup besar dan dominan, khususnya di antara negara-negara teluk Arab.

BAB III

RIVALITAS IRAN & ARAB SAUDI DALAM KONFLIK DI SURIAH

BERDASARKAN PERSPEKTIF PERANG PROKSI

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dengan bagaimana kedua negara mengintervensi dan memberikan dukungan serta bantuan untuk masing-masing kubu berbeda yang bertikai di Suriah. Iran dengan dukungan penuhnya terhadap presiden Bashar Al-Assad dan Arab Saudi dengan dukungannya terhadap kelompok-kelompok pemberontak dan militan Sunni lainnya seperti *Free Syrian Army*. Baik Iran maupun Arab Saudi memiliki agenda dan kepentingannya masing-masing untuk ikut berpartisipasi sekaligus mengintervensi konflik sektarian yang terjadi.

Rivalitas Iran dan Arab Saudi dalam satu dekade konflik sektarian di Suriah dipengaruhi dan didorong oleh isu sektarian yang digunakan kedua negara untuk kemudian menjustifikasi intervensi yang dilakukan di Suriah selama satu dekade terakhir. Perbedaan nilai akan keyakinan yang dianut masing-masing negara membuat keduanya rentan akan ketegangan dan ke bersinggungan satu dengan yang lain. Iran dengan mayoritas Syiah dan Arab Saudi dengan mayoritas Sunni, menciptakan situasi geopolitik dan ketidakstabilan keamanan di kawasan Timur-Tengah.

Fenomena persaingan yang biasa dikenal dengan istilah perang proksi ini didasari adanya ambisi kedua belah pihak untuk memperluas pengaruh dan mempertegas dominasinya di kawasan. Baik Iran dan Arab Saudi telah melakukan berbagai macam jenis upaya melakukan serangkaian aktivitas pola perang proksi di Suriah selama satu dekade terakhir, dan dalam bab ini dengan menggunakan

kerangka berpikir teori perang proksi oleh Amos C. Fox yang diatur berdasarkan dinamika hubungan antara *Principal* dan *Agent*. Di mana terdapat dua permasalahan yang menjadi variabel penting untuk kemudian dapat mengklasifikasikan fenomena studi kasus ini ke dalam salah satu dari lima model perang proksi yang ditawarkan (Fox 2021).

3.1. Agency Problem Iran dan Arab Saudi

Agency Problem sebagaimana yang dijelaskan dalam teori Keagenan, muncul ketika terjadinya konflik kepentingan antara aktor yang berperan sebagai *Principal* dan aktor yang berperan sebagai *Agent*. Lebih lanjut juga dikatakan bahwa situasi ini sering terjadi dikarenakan baik *Principal* dan *Agent* sama-sama memiliki agenda prioritasnya masing-masing yang kemudian berdampak kepada keberlanjutan hubungan proksi antara *Principal* dan *Agent*. Dalam konflik sektarian di Suriah, Iran yang bertindak sebagai aktor *Principal* menunjuk aktor-aktor *Agent* untuk melaksanakan agenda proksinya di Suriah yakni kelompok-kelompok Pro-Assad yang sengaja dibentuk dan direkrut untuk kemudian berperang dan memberikan perlawanan terhadap kelompok pemberontak (Azizi 2022).

Iran mengirimkan sejumlah pasukan elite militer Al-Quds miliknya dan sejumlah pasukan yang tergabung dalam satuan khusus IRGC untuk selanjutnya melakukan langkah-langkah strategis secara militer seperti nasehat, strategi perang hingga perekrutan dan pelatihan terhadap sejumlah kelompok-kelompok militan Syiah pro-Assad. Selain itu, Iran juga menghadirkan sejumlah pasukan dari kelompok Hizbullah Lebanon dan kelompok Brigade Fatemiyoun dan Zainabiyoun yang berperan penting dalam upaya penaklukan dan perebutan kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya telah dikuasai oleh kelompok pemberontak. Sebagai

catatan, bahwa kelompok-kelompok di atas semuanya terpusat dan terawasi langsung ke dalam satu sistem komando yang dikendalikan dan diarahkan oleh Jenderal Qasem Soleimani selaku Komandan IRGC (Hamidreza Azizi 2022).

Kelompok-kelompok proksi Iran yang berperan sebagai aktor *Agent* di atas kemudian terlihat mampu menjalankan dan melakukan apa yang diharapkan oleh Iran, yakni memastikan dan menghalau segala jenis upaya pelengseran presiden Bashar Al-Assad yang oleh Iran dianggap sebagai penguasa yang secara sah diakui sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Kelompok-kelompok militansi pro-Assad juga terlihat memiliki agenda yang sejalan dengan Iran di mana selama periode satu dekade konflik berlangsung, kubu Assad terlihat tetap kokoh dan kompak dalam upayanya memberikan perlawanan dalam pertempuran di beberapa wilayah kota di Suriah (Miller 2018).

Iran memiliki agenda prioritas yang cukup besar dan penting dalam upayanya menjaga dan mengamankan legitimasi kekuasaan presiden Suriah, Bashar Al-Assad. Di mana Iran melihat aliansi yang dapat dijaga antara Iran dan Suriah di bawah pimpinan Assad dapat menjadi kunci penting dalam upayanya mencapai ambisi dominasi kawasan di Timur-Tengah, serta untuk terus menguatkan posisinya memberikan tekanan dan perlawanan terhadap dunia barat dan sekutunya, khususnya Israel dan Arab Saudi (Miller 2018).

Hubungan proksi antara Iran dan Pro-Assad dapat dikatakan tidak memiliki masalah dalam konteks *Agency Problem*, dikarenakan tidak ditemukannya konflik kepentingan antara Iran sebagai *Principal* dan kelompok-kelompok Pro-Assad sebagai *Agent*.

Disisi lain Arab Saudi yang bertindak sebagai *Principal* memiliki beberapa kelompok *Agent* untuk memainkan proksi di Suriah. Termasuk di antaranya negara-negara sekutu di teluk Arab. Sementara di Suriah terdapat aktor lain yang bertindak sebagai *Agent* proksi yakni kelompok-kelompok pemberontak yang tergabung dalam kelompok *Free Syrian Army*. Awalnya ditunjuk untuk kemudian berperang mengangkat senjata, guna memberikan perlawanan terhadap upaya pemberontak atas Presiden Bashar Al-Assad. Dukungan yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap kelompok tersebut didasari atas dorongan rasa solidaritas terhadap penderitaan kelompok masyarakat Sunni Suriah yang mengalami penindasan oleh rezim Syiah yang berkuasa. Sehingga kemudian agenda yang dimainkan oleh Arab Saudi ialah tentang bagaimana mengupayakan perlawanan untuk kemudian dapat melengserkan Presiden Assad dari kursi kekuasaan. Suplai senjata, bantuan logistik serta pendanaan militer dilakukan untuk mendukung upaya kampanye militer kelompok-kelompok pemberontak di beberapa wilayah kota di Suriah (Akgul 2016).

Munculnya divisi-divisi lain di antara kelompok masyarakat Sunni di Suriah yang seharusnya menjadi bagian dari *Agent* proksi Arab Saudi. Menjadi tantangan yang kemudian harus dihadapi ketika bentrokan kepentingan antara kelompok Sunni moderat seperti FSA dengan kelompok Sunni ekstremis seperti Jabhat Al-Nusra yang terafiliasi dengan Al-Qaeda serta kelompok-kelompok lain yang juga terafiliasi kelompok aliran keras lainnya seperti Ikhwanul Muslimin. Kemunculan kelompok-kelompok tersebut menyebabkan situasi persaingan dan ketegangan tersendiri di antara kelompok-kelompok Sunni di Suriah. Yang mengakibatkan

hilangnya pengaruh dan komitmen Arab Saudi di Suriah secara perlahan (Erwin van Veen 2021).

Berkurangnya pengaruh Arab Saudi pada konflik di Suriah berakibat juga terhadap pergantian kepentingan mereka di Suriah. Sebagaimana diketahui terdapat faktor seperti komitmen negara aliansi lainnya seperti Turki, Amerika Serikat dan Qatar yang di mana memiliki agenda prioritasnya masing-masing. Yang seiring berjalannya waktu dianggap sudah tidak sejalan dengan kepentingan yang ingin dicapai oleh Arab Saudi. Turki dengan kesepakatan rekonsiliasi terhadap situasi di Suriah, serta terdapat juga kesepakatan menetralkan hubungan dengan Iran dikarenakan kebutuhan Turki terhadap gas alam yang dimiliki Iran hingga munculnya kelompok Kurdi di Utara Suriah yang berbatasan langsung dengan wilayah Turki, yang notabene Rusia dan Iran berada di Kubu Pro-Assad (Erwin van Veen 2021).

Situasi ini juga diperparah dengan Amerika yang terus menarik mundur pasukannya di Suriah pasca berhasil memerangi kelompok teroris ISIS. Sekitar 2000 personil tentara Amerika Serikat ditarik mundur dan hanya menyisakan 100-300 personil di pangkalan militer mereka di daerah bernama *Tanf*, sebuah daerah yang berbatasan langsung dengan Yordania dan Suriah (Sly, The Washington Post 2019). Serta Qatar yang pada akhirnya harus di boikot oleh Arab Saudi atas dukungannya terhadap kelompok seperti *Jabhat Al-Nusra* yang terafiliasi dengan *Al-Qaeda*. Konflik ini telah berlangsung dalam skala yang besar dan kompleks, dengan pihak-pihak eksternal memainkan peranan yang kuat dan strategis, sehingga menyebabkan perang berlarut-larut dan menghambat upaya Arab Saudi untuk mencapai tujuannya (Wintour 2017).

Sehingga situasi ini kemudian menunjukkan terdapat konflik kepentingan antara Arab Saudi dengan sekutu-sekutunya. Dan menjadi bagian dari Agency Problem Arab Saudi, di mana kepentingan yang ingin dicapai oleh Arab Saudi sebagai *Principal* tidak mampu dicapai oleh proksi-proksi Arab Saudi yang bertindak sebagai *Agent*. Dikarenakan tidak adanya komitmen bersama antara Arab Saudi dengan sekutunya di Suriah untuk kemudian mengupayakan satu tujuan bersama. Dan hal ini berakibat pada berkurangnya komitmen penuh Arab Saudi untuk terus melanjutkan hubungan dengan kelompok proksinya di Suriah. Sebagaimana dikatakan bahwa dalam fenomena perang proksi, *Principal* dapat kemudian memutuskan hubungan dengan *Agent* jika aktor *Principal* merasa bahwa *Agent* tidak mampu menjaga momentum terhadap kepentingan akhir yang ingin dicapai *Principal* (Fox 2021, 54).

Sehingga dengan demikian variabel *Agency Problem* hanya ditemukan pada hubungan proksi *Principal-Agent* Arab Saudi, di mana ketika kelompok-kelompok oposisi yang didukung oleh Arab Saudi memiliki tujuan dan prioritasnya sendiri yang tidak selalu sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Arab Saudi. Selain itu, kelompok-kelompok tersebut bisa memiliki ikatan dan ketergantungan pada pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan mereka.

3.2. Risk of Sharing Iran dan Arab Saudi

Risk of Sharing dikatakan adalah suatu kondisi di mana kedua belah pihak menyepakati pembagian dalam hal risiko dan menyepakati adanya pembagian dari hasil kerja sama atas hubungan yang dijalin. Dan dalam konteks pembahasan ini adalah adanya upaya yang siap ditanggung baik *Principal* maupun *Agent* terhadap segala jenis risiko yang dapat timbul dari serangkaian proksi yang dilakukan. Dan

dalam beberapa kasus, *Risk of Sharing* sering kali menjadi tolak ukur dalam menentukan durasi hubungan *Principal-Agent* dan kuat atau lemahnya ikatan antara keduanya (Fox 2021).

Iran dalam perkembangannya memiliki situasi yang sedikit unik, di mana sebelum melakukan dan menjalin hubungan proksi dengan pemerintah Suriah, keduanya telah terlihat terlebih dahulu memiliki ikatan kemitraan dan kerja sama dalam bentuk pakta integritas pertahanan ditahun 2006. Di mana hal ini berakibat pada penguatan kerja sama ekonomi kedua negara. Selain itu fakta di mana bahwa kedekatan keduanya juga didasari adanya dorongan akan kesamaan identitas aliran ajaran Syiah yang membuat hubungan *Principal-Agent* kedua negara terikat secara kultural (OŻAROWSKI 2018).

Ikatan kultural yang dimiliki kedua negara tersebut kemudian berdampak pada kemauan dan tekad Iran maupun proksi-proksinya yang bertindak sebagai *Agent* untuk kemudian bertindak menghadapi ancaman dalam tingkat risiko yang tinggi. Sebagaimana dijelaskan tentang bagaimana kemudian kelompok Hizbullah Lebanon yang merupakan sebuah partai politik dan paramiliter dari cabang Islam Syiah yang ikut meramalkan situasi konflik di Suriah. Banyak yang mempertanyakan justifikasi kelompok tersebut untuk kemudian ikut terlibat, serta kepentingan yang dirasa tidak sebesar kepentingan aktor-aktor lain.

Dampak dari intervensi militer yang dilakukan baik Iran beserta proksi-proksinya menarik perhatian dan kritik dari banyak negara di dunia. Beberapa negara dapat memberlakukan sanksi ekonomi atau membatasi hubungan diplomatik dengan Iran sebagai tanggapan atas campur tangan mereka di Suriah. Risiko kecaman dan sanksi internasional dikarenakan intervensi militer yang

dilakukan perlu diperhitungkan dan menjadi tanggung jawab bersama Iran beserta proksi-proksinya. Lebih lanjut, situasi konflik yang berlarut-larut juga hanya akan berdampak pada pembengkakan pengeluaran dan biaya anggaran kampanye militer Iran. Sebagaimana dapat diketahui pada tahun awal yakni ditahun 2013 Iran mengeluarkan anggaran bantuan sebesar 3.5 milyar dolar Amerika sebagai dana bantuan kepada pemerintah Suriah. Yang di mana jumlah ini tentunya bisa lebih besar mengingat konflik sudah berlangsung hingga satu dekade lamanya (Terrill 2015).

Satu dekade konflik berlangsung, situasi Iran maupun Suriah berada pada tahap di mana kedua negara mungkin tidak akan mampu bertahan untuk waktu yang cukup lama lagi. Ketika kondisi ekonomi Suriah benar-benar runtuh dikarenakan perang yang tak kunjung usai, serta situasi sanksi dan isolasi yang dijatuhkan oleh negara-negara sekitar kawasan membuat Suriah hanya mampu bergantung dan mengandalkan bantuan dari Iran. Sementara itu, Iran juga tidak sedang berada pada situasi yang baik-baik saja. Sanksi internasional akibat program nuklir dalam negeri juga memberi dampak yang begitu berat bagi beban perekonomian Iran. Namun demikian komitmen Iran dalam menjaga ikatan proksi dengan Suriah dengan tetap konsisten memberikan bantuan ekonomi dan kemanusiaan menunjukkan besarnya komitmen Iran menanggung dan menghadapi tingkat risiko yang tinggi dari hubungan proksi yang dijalin keduanya (IOD 2021).

Lebih lanjut dibanding beban serta risiko yang telah disebutkan di atas, para pemimpin Iran merasa hal tersebut tidak lebih berat dengan adanya ancaman lain yang perlu juga dipertimbangkan. Sebagaimana diketahui bahwa Iran begitu berambisi menyebarluaskan pengaruhnya di kawasan dan terus berusaha

mempertahankan posisi strategisnya dalam upaya menentang pengaruh Israel dan Amerika Serikat. Suriah dianggap sebagai elemen penting dalam kampanye *Axis of Resistance* di mana penggulingan rezim Assad akan melemahkan agenda tersebut. Serta membatasi pilihan perlawanan yang dimiliki Iran jika sewaktu-waktu ada serangan Amerika atau Israel terhadap situasi nuklir yang sebelumnya sempat dan masih dicurigai oleh negara-negara Arab dan Barat (Haji-Yousefi 2020, 218-219).

Sementara itu disisi lain Arab Saudi yang dihadapkan dengan situasi yang tidak menguntungkan dalam upayanya menggulingkan presiden Assad. Arab Saudi menghadapi tantangan yang cukup sulit dalam upayanya menggulingkan Presiden Assad di Suriah. Meskipun telah memberikan dukungan militer dan finansial kepada kelompok pemberontak oposisi, konflik sektarian di Suriah telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa oleh rezim Assad yang didukung oleh Iran dan proksi-proksinya. Sebagaimana dapat dilihat dengan pihak pemberontak, khususnya kelompok FSA yang didukung Arab Saudi kehilangan kendali atas wilayah-wilayah strategis yang sebelumnya berhasil mereka taklukan seperti, Aleppo dan kota kuno Palmyra (Dettmer 2013).

Kesulitan Arab Saudi dalam mencapai dan mempertahankan tujuan akhirnya untuk menggulingkan Assad menunjukkan betapa kompleksnya tantangan yang ada dalam upaya suatu negara mengintervensi konflik internal negara lain. Meskipun memiliki kepentingan strategis di wilayah tersebut, peran Arab Saudi dalam konflik Suriah telah menyebabkan dampak yang tidak terduga dan meningkatkan risiko secara internal dan eksternal. Termasuk dampak yang harus dipikirkan atas situasi konflik kepentingan yang terjadi di antara sekutu-sekutunya seperti Turki dan Amerika Serikat, yang di mana hal ini bisa berakibat terhadap

kemampuan Arab Saudi dalam menjaga ambisinya menjadi negara dominan di Timur-Tengah dikarenakan kurangnya daya tekan dan persuasi yang dimiliki Arab Saudi terhadap negara lain atau aktor non-negara yang memiliki pengaruh penting.

Oleh karena itu, dalam menghadapi situasi yang tidak menguntungkan ini, Arab Saudi mungkin perlu mengevaluasi kembali strategi dan pendekatannya terhadap konflik Suriah, serta mempertimbangkan solusi politik dan diplomasi untuk mengatasi situasi dan krisis mendatang, termasuk di antaranya menghalau pengaruh Iran.

Lebih lanjut dengan sudah dapat dipastikannya Iran memenangi pertempuran di Suriah yang ditandai dengan intensitas perang yang kian menurun serta hampir seluruh wilayah telah berhasil dikuasai kembali oleh pemerintahan Assad. Dominasi Iran di Suriah dan keberhasilan Assad dalam mempertahankan kekuasaannya dapat memperkuat posisi Iran di kawasan semakin strategis, termasuk salah satunya jalur perbatasan antara Suriah, Lebanon, dan Israel. Kemenangan ini juga dapat memperkuat sekutu-sekutu regional Iran, termasuk kelompok-kelompok militan Syiah yang mendukung kepentingan Iran (Saad 2021).

Kekhawatiran utama bagi Arab Saudi adalah eskalasi ketegangan regional antara Iran dan negara-negara Teluk, yang telah lama menjadi pesaing regional di wilayah Timur Tengah. Dengan dominasi Iran di Suriah, keseimbangan kekuatan di wilayah tersebut berubah, dan ini dapat menyebabkan lebih banyak persaingan dan potensi konflik. Arab Saudi juga mungkin menghadapi tekanan domestik dan eksternal untuk memikirkan kembali strategi mereka dalam menghadapi situasi di Suriah. Peran dan dukungan Saudi terhadap pemberontak oposisi telah gagal mencapai tujuan menggulingkan Assad, dan keberhasilan Iran dalam konflik dapat

menyebabkan pertanyaan tentang efektivitas pendekatan Saudi dalam konteks Suriah. Sehingga pertimbangan dan toleransi risiko antara Arab Saudi dan kelompok pemberontak proksinya terlihat sudah tidak sejalan yang kemudian akan menghasilkan tindakan yang berbeda ketika upaya menghadapi risiko terus dilanjutkan.

Dalam menghadapi situasi ini, Arab Saudi mungkin perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih diplomatis dan rekonsiliasi untuk mengatasi ketegangan regional dan mencari cara-cara untuk menjaga kepentingan keamanan nasional mereka. Diplomasi dan negosiasi yang lebih aktif dapat menjadi jalur untuk mencari solusi politik bagi Suriah, yang pada akhirnya dapat mengurangi ketegangan dan mengejar stabilitas di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, dominasi Iran di Suriah dan keberhasilan pemerintahan Assad dalam menguasai kembali wilayah telah membentuk peta politik dan keamanan yang baru di wilayah Timur Tengah, di mana hal ini dapat berdampak terhadap kepentingan dan kebijakan Arab Saudi. Oleh karena itu, langkah selanjutnya bagi Arab Saudi akan menjadi penting dalam menentukan arah hubungan regional dan strategi keamanan mereka di tengah dinamika yang berubah ini (Erwin van Veen 2021).

3.3. Klasifikasi Model Proksi Iran dan Saudi

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas sebelumnya, baik Iran maupun Arab Saudi memiliki masalah dinamika antara *Principal-Agent* yang berbeda. Iran dengan pola toleransi risiko yang tinggi terhadap dampak-dampak proksi yang dilakukan cenderung menunjukkan karakteristik model kultural. Adanya ikatan kultural yang kuat antaran cabang aliran Syiah Iran dan Presiden Bashar Al-Assad

menunjukkan bahwa satu entitas kultural mampu melintasi batas-batas geopolitik satu sama lain. Ditambah Iran sebagai *Principal* mampu memanipulasi dan mengeksploitasi kelompok aliran Syiah lainnya yakni Hizbullah dan Brigade *Fatemiyoun* dan *Zainabiyoun* untuk kemudian menjalankan agenda strategis politik proksinya (Fox 2021).

Selain itu juga dapat diklasifikasikan sebagai bentuk model eksploitatif, di mana situasi terakhir yang ditunjukkan oleh proksi-proksi Iran yang bertindak sebagai *Agent* menunjukkan kondisi kerentanan yang menyebabkan mereka terlihat seakan tidak mampu bertahan tanpa bantuan Iran. Atau secara sederhana Iran telah berhasil membuat *Agent-agent* tersebut menjadi begitu bergantung terhadap kehadiran dukungan Iran selaku *Principal*. Namun kemudian, dikatakan secara paradoks bahwa *Agent* kemudian memberikan satu nilai atau manfaat tertentu kepada *Principal* dan oleh karenanya, *Principal* akan melakukan segala macam upaya yang harus dilakukan untuk memastikan kelangsungan hidup *Agent-agent-nya*. Ketergantungan ini juga menciptakan satu ikatan yang kuat antara *Principal* dan *Agent*, sehingga menghasilkan satu hubungan yang memiliki kekuasaan dan pengaruh yang hampir tak terbatas terhadap dinamika proksi (Fox 2021, 6-7).

Dalam model ini dapat dilihat dengan bagaimana bantuan dan dukungan finansial terus dilakukan oleh Iran kepada *Agent* proksinya seperti, Hizbullah dan brigadir *Fatemiyoun* dan *Zainabiyoun* yang beroperasi di berbagai wilayah. Tindakan ini menjadi bukti konkret mengenai kualitas dan nilai yang melekat pada upaya mereka dalam mendukung ambisi dan kepentingan yang dikejar oleh Iran. Melalui peran aktif dalam konflik regional dan pengaruhnya terhadap dinamika politik serta keamanan di Timur Tengah, Iran menggunakan agen-agen proksinya

sebagai alat untuk mencapai tujuan strategisnya. Dukungan finansial yang berkelanjutan terhadap entitas-entitas ini tidak hanya memperlihatkan komitmen Iran terhadap penguatan pengaruhnya, tetapi juga menggambarkan peran signifikan yang dimainkan oleh agen-agen tersebut dalam melindungi kepentingan Iran di tingkat internasional.

Selain itu juga terdapat kondisi ketergantungan pemerintah Suriah terhadap dukungan dan bantuan Iran. Dukungan finansial, militer, dan politik yang terus mengalir dari Iran telah memainkan peranan penting dalam menjaga stabilitas rezim Assad dan memungkinkannya bertahan dalam menghadapi tantangan internal dan eksternal. Dengan infrastruktur ekonomi yang hancur dan kekurangan sumber daya, pemerintah Suriah sangat mengandalkan bantuan Iran untuk memenuhi kebutuhan dasar serta menjalankan pemerintahan (Terrill 2015).

Ketergantungan semacam ini tidak hanya mencakup aspek materiil, tetapi juga membentuk hubungan politik yang kuat antara kedua negara. Hal ini memberikan Iran pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dalam negeri dan luar negeri Suriah, membentuk dinamika regional yang berdampak luas. Terlebih lagi, ketergantungan ini juga memperkuat posisi Iran sebagai pemain utama dalam skenario konflik di Suriah, menguatkan kehadiran dan dominasinya dalam persaingan geopolitik di kawasan tersebut (Fox 2021).

Sementara itu Arab Saudi di satu sisi juga memiliki dorongan ikatan kultural yang sama dengan proksi mereka di Suriah, yakni negara-negara sekutu di teluk Arab dan kelompok pemberontak FSA yang merupakan kelompok dari golongan masyarakat Sunni Suriah yang mendapatkan dukungan dan bantuan dari Arab Saudi atas dasar solidaritas sesama Sunni. Namun, dalam perkembangannya Arab Saudi

tidak mampu mempertahankan pola model kultural sebagaimana yang dilakukan Iran dikarenakan kepentingan Arab Saudi sebagai *Principal* tidak mampu dicapai atau dilaksanakan dengan baik oleh proksi-proksi Arab Saudi yang berperan sebagai *Agent* dalam dinamika hubungan proksi *Principal-Agent* (Fox 2021).

Di tambah model proksi yang ditunjukkan oleh Arab Saudi lebih cenderung kepada model koersif di mana Arab Saudi menggunakan kekuatan ekonomi serta pengaruhnya yang dominan terhadap aktor-aktor proksi mereka untuk kemudian memaksa mereka terlibat dalam memberikan bantuan serta dukungan untuk menekan dan memberikan perlawanan terhadap presiden Suriah Bashar Al-Assad. Serta juga untuk menghalau dan menghalangi pengaruh Iran agar tidak menyebar dan menguat semakin besar (Fox 2021).

Kemudian lebih lanjut juga dijelaskan bahwa pada model koersif ini, karakteristik yang ditunjukkan dengan rendahnya kemauan aktor-aktor *Agent* dalam berbagi risiko terhadap tercapainya kepentingan *Principal* menjadi faktor yang membuat model proksi ini menghasilkan hubungan proksi antara *Principal* dan *Agent* yang lemah. Di mana tidak ada komitmen bersama yang kuat dan jelas. Ditambah dengan manuver tiba-tiba yang dilakukan Qatar di tengah pertempuran dengan mendukung kelompok proksi lain seperti *Jabhat Al-Nusra* hanya menunjukkan bahwa terdapat konflik kepentingan serta motivasi berbeda antara Arab Saudi dengan kelompok Proksinya (Wintour 2017).

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Konflik sektarian yang terjadi di Suriah lahir dari efek domino yang ditimbulkan oleh fenomena Arab Spring, sebuah fenomena di mana kelompok masyarakat di Timur-Tengah menuntut mundur penguasa di negerinya dan segera melakukan demokratisasi. Lebih lanjut unjuk rasa serta protes kemudian berubah menjadi konflik perang skala penuh yang kemudian mengundang banyak perhatian dunia serta negara-negara sekitar kawasan. Kehadiran serta intervensi Iran dan Arab Saudi sebagai dua negara dengan pengaruh politik yang cukup kuat dalam mendukung dua kubu yang berbeda di Suriah, tidak hanya menambah panasnya suasana, namun juga menyulitkan terciptanya upaya-upaya penengahan terhadap konflik tersebut.

Iran dan Arab Saudi melakukan perang proksi di Suriah berangkat dengan membawa agenda serta kepentingan politik masing-masing. Di mana Iran melihat Suriah di bawah pimpinan presiden Assad adalah satu elemen penting yang dapat menguatkan pengaruh serta ambisi mereka di kawasan. Sementara itu, Arab Saudi dilain pihak datang untuk menghalau dan menggagalkan agar upaya Iran dalam meraih ambisinya tersebut tidak tercapai.

Dinamika hubungan proksi *Principal-Agent* yang dilakukan kedua negara kemudian memunculkan masalah masing-masing yang berdampak pada hasil perang proksi yang dimainkan. Di mana Arab Saudi lebih tidak diuntungkan dikarenakan adanya konflik kepentingan antara Arab Saudi sebagai *Principal* dengan beberapa negara sekutunya yang memiliki agenda prioritasnya sendiri.

Menyebabkan terjadinya *Agency Problems* untuk Arab Saudi, di mana kondisi ini terjadi dikarenakan adanya konflik kepentingan antara Arab Saudi sebagai *Principal* dan negara-negara sekutu Saudi sebagai *Agent* atau mitra dalam melakukan proksi di Suriah. Selain ini hal ini juga berdampak pada komitmen Arab Saudi untuk meningkatkan dukungannya terhadap kelompok-kelompok pemberontak seperti FSA, sehingga mengakibatkan kurangnya kemampuan dan perlawanan yang dapat dilakukan kelompok FSA untuk melengserkan Assad.

Disisi lain Iran kian kuat dengan tidak memiliki permasalahan *Agency Problems*, di mana Iran mampu memastikan para aktor *agent* proksinya untuk tetap sejalan dalam mencapai kepentingan bersama dan menghindari bentrok terhadap konflik kepentingan satu dengan yang lain. Di tambah komitmen besar yang ditunjukkan Iran untuk kemudian menanggung segala macam risiko yang dapat ditimbulkan akibat hubungan proksi yang dilakukan menunjukkan adanya ambisi besar Iran untuk memastikan tercapainya dominasi serta pengaruh di kawasan Timur-Tengah. Serta menjadi kunci penting mereka untuk tetap konsisten menentang entitas Israel dan dunia barat bersama Suriah sebagai bagian dari aliansi *Axis of Resistance*.

Kemudian klasifikasi model proksi kedua negara juga menjelaskan bagaimana hubungan proksi masing-masing negara menjelaskan bahwa Iran dengan *agent* proksinya cenderung memiliki hubungan serta ikatan proksi yang kuat dikarenakan adanya ikatan kultural. Yakni kesamaan identitas sebagai kelompok Islam Syiah yang di mana hal ini berdampak pada komitmen Iran untuk secara penuh melakukan upaya dukungan dan bantuan terhadap presiden Assad dan aliansi proksi lainnya. Selain itu terdapat juga model eksploitatif, di mana kemudian

membentuk hubungan politik yang kuat antara kedua negara. Hal ini memberikan Iran pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dalam negeri dan luar negeri Suriah, membentuk dinamika regional yang berdampak luas. Terlebih lagi, ketergantungan ini juga memperkuat posisi Iran sebagai pemain utama dalam skenario konflik di Suriah, menguatkan kehadiran dan dominasinya dalam persaingan geopolitik di kawasan tersebut.

Sementara Iran yang sudah dapat dipastikan mengamankan posisi dan agendanya di Suriah menunjukkan satu ikatan dan hubungan *Principal-Agent* yang kuat. Di mana walaupun berangkat dengan dorongan kesamaan identitas kultural tertentu, Iran cenderung menunjukkan komitmen besar dan luar biasa dalam melakukan proksi di Suriah. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam tulisan ini, Iran menunjukkan adanya kesiapan dalam menanggung segala jenis risiko bersama dengan Bashar Al-Assad demi tercapainya ambisi Iran.

Arab Saudi di satu sisi juga memiliki dorongan ikatan kultural yang sama dengan proksi mereka di Suriah. Namun kemudian, ketidakmampuan *agent* proksi Saudi di Suriah menyebabkan hilangnya komitmen mereka terhadap ikatan ini. Dan cenderung melakukan manuver dengan menggunakan kekuatan ekonomi mereka yang besar dan kuat untuk kemudian menunjukkan sebuah bentuk model koersif, di mana Arab Saudi menggunakan kekuatan ekonomi serta pengaruhnya yang dominan terhadap aktor-aktor proksi mereka untuk kemudian memaksa mereka terlibat dalam memberikan bantuan serta dukungan untuk menekan dan memberikan perlawanan terhadap presiden Suriah Bashar Al-Assad.

Akan tetapi dalam model ini terdapat karakteristik yang menunjukkan adanya kemauan yang rendah oleh aktor-aktor *Agent* dalam berbagi risiko terhadap

tercapainya kepentingan *Principal*. Sehingga menciptakan hubungan *Principal-Agent* yang dikatakan tidak awet dan rentan akan perpecahan.

4.2 Rekomendasi

Mengingat bagaimana kompleksnya situasi konflik di Suriah dengan ditunjukkan banyaknya aktor yang terlibat membawa kepentingan serta agenda mereka masing-masing, membuat penulis merasa perlu adanya upaya penelitian lebih lanjut terkait isu ini. Di mana dalam tulisan ini dianggap lebih fokus pada perspektif serta peran yang dilakukan antara Iran dan Arab Saudi dalam melakukan perang proksinya di Suriah. Mengingat pada kondisinya nyatanya situasi yang terjadi di Suriah terdapat aktor-aktor lain seperti Amerika, Rusia hingga Turki yang dikatakan juga ikut terlibat dan memiliki agenda serta kepentingannya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Akgul, Nazife Selcen Pinar. 2016. "From Stillness to Aggression: The Policy of Saudi Arabia towards Syria after the Arab Spring." *International Journal of Humanities and Social Science* 39-42.
2020. *AlJazeera*. 17 December. Diakses May 22, 2023.
<https://www.aljazeera.com/news/2020/12/17/what-is-the-arab-spring-and-how-did-it-start>.
2018. *ALJAZEERA*. 14 April. Diakses March 15, 2023.
<https://www.aljazeera.com/news/2018/4/14/syrias-war-explained-from-the-beginning>.
- Alotaibi, Lujain. 2023. *Carnegie Endowment for International Peace*. 6 June. Diakses July 15, 2023. <https://carnegieendowment.org/sada/89893>.
- Alpert, Emily. 2012. *Los Angeles Times*. 7 February. Diakses March 14, 2023.
<https://www.latimes.com/archives/blogs/world-now/story/2012-02-07/what-does-it-mean-to-be-alawite-and-why-does-it-matter-in-syria#:~:text=Alawites%20identify%20as%20Shiite%20Muslims,faith%2C%20the%20Alawites%20have%20seven>.
- Ayton, Matthew. 2021. *Al-Jazeera*. 8 June. Diakses April 13, 2023.
<https://www.aljazeera.com/news/2021/6/8/times-have-changed-saudi-syria-in-rapprochement-talks>.
- Azizi, Hamidreza. 2022. "Integration of Iran-backed armed groups into the Iraqi and Syrian armed forces: implications for stability in Iraq and Syria." *Small Wars & Insurgencies* 499-527.
- Badawi, Youssef. 2018. *THE CONVERSATION*. 13 April. Diakses March 15, 2023. <https://theconversation.com/syria-whos-involved-and-what-do-they-want-95002>.
2017. *BBC*. 17 April. Diakses May 23, 2023. <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-39528673>.
- Chivers, C .J. 2016. *The New York Times*. 24 January. Diakses August 18, 2023.
<https://www.nytimes.com/2016/01/24/world/middleeast/us-relies-heavily-on-saudi-money-to-support-syrian-rebels.html>.
- Cueto, José Carlos. 2021. *BBC*. 2 September. Diakses May 23, 2023.
<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-58417924>.
- Dettmer, Jamie. 2013. *Middle East Institute*. 21 October. Diakses August 19, 2023. <https://www.mei.edu/publications/syrias-rebels-radicalization-and-division>.
- Ellison, Danielle. 2016. "FPI Bulletin:: Saudi Arabia and the Syrian Civil War." *Foreign Policy Initiative* 1-3.
- Erwin van Veen, Alba Di Pietrantonio Pellise, Nancy Ezzeddine and Paolo Napolitano. 2021. *Tracing the evolution of the Syrian civil war (2011-2020)*. Research, Wassenaar: Clingendael Institute.
- Ferrari, Marco. 2023. *Al Arabiya English*. 25 April. Diakses July 17, 2023.
<https://english.alarabiya.net/News/saudi-arabia/2023/04/25/Saudi-military-expenditure-fifth-highest-in-the-world-in-2022-Report>.
- Fisher, Max. 2016. *vox.com/sunni-shia*. 5 January. Diakses March 13, 2023.
<https://www.vox.com/2016/1/5/10718456/sunni-shia>.
- Fox, Amos C. 2021. "Strategic Relationships, Risk, and Proxy War." *Journal of Strategic Security* 1-20.

- Gardner, Frank. 2015. *BBC News*. 8 October. Diakses March 15, 2023. <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-34479929>.
- Haji-Yousefi, Amir Mohammad. 2020. "Iran's Policy in the Syrian Civil War: From Liberal Pacifism to Liberal Interventionism." *International Journal of Economics and Politics* 211-230.
- Hamidreza Azizi, Amir Hossein Vazirian. 2022. "The Role of Armed Non-State Actors in Iran's Syria Strategy: A Case Study of Fatemiyoun and Zainabiyoun Birgades." *Journal of Balkan and Near Eastern Studies* 540-557.
- Hanjing Yue, Yulong Zhao. 2020. "Russia's Fundamental Interest in the Syrian Conflict and Strategies to Realize it." *Scholars Journal of Arts, Humanities and Social Sciences* 379-388.
- Heather Chen, Sahar Akbarzai and Aliza Khalidi. 2022. *CNN*. 1 July. <https://edition.cnn.com/2022/07/01/world/syria-war-united-nations-report-intl-hnk/index.html>.
- IOD. 2021. *iranopendata.org*. 1 December. Diakses May 17, 2023. <https://iranopendata.org/en/pages/an-overview-of-iran-s-economic-decline-from-pre-revolution-9-annual-growth-to-less-than-2>.
- Jeffrey Martini, Erin York and William Young. 2013. *Syria as an Arena of Strategic Competition*. California: RAND Corporation.
- KADDORAH, EMAD Y. 2018. "The Regional Geo-sectarian Contest over the Gulf." *SET VAKFI İktisadi İşletmesi, SETA VAKFI* 21-38.
- KBBI. t.thn. *Kamu Besar Bahasa Indonesia*. Diakses March 14, 2023. <https://kbbi.web.id/sektarianisme>.
- Kizilkaya, Zafer. 2017. "Hizbullah's Moral Justification of Its Military Intervention in the Syrian Civil War." *The Middle East Journal* 211-228.
- Mandracı, Berkay. 2022. *INTERNATIONAL CRISIS GROUP*. 22 February. Diakses May 22, 2023. <https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/western-europemediterranean/turkey/turkeys-pkk-conflict-regional-battleground-flux>.
- Marcus George, Yeganeh Torbati. 2012. *reuters.com*. 30 August. Diakses April 6, 2023. <https://www.reuters.com/article/iran-summit-idINDEE87T09420120830>.
- Marcus, Jonathan. 2019. *bbc.com/news*. 16 September. Diakses March 13, 2023. <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-42008809>.
- Meskela, Abdi Zenebe. 2013. "The Syrian Crisis and External Involvement: Geopolitical and Security Dimensions, March 2011 to December 2012." *Institute of Peace and Conflict Studies, University of Hargeisa* 1-20.
- Miller, Benjamin. 2018. "How Iran Became the Dominant Power in the Middle East." *Begin-Sadat Center for Strategic Studies* 1-4.
- O'Bagy, Elizabeth. 2013. *The Free Syrian Army*. Washington D.C: the Institute for the Study of War.
- OŻAROWSKI, Rafal. 2018. "Iran's Engagement in Syrian Conflict. Causes and Consequences." *Przegląd Strategiczny* 201-210.
- Patrick van der Heiden, Alex Krijger. 2018. "The Saudi-Iranian Rivalry: An Ominous Zero-Sum Game for Supremacy." *Atlantische Commisie* 11-15.

- Perry, Tom. 2022. *Reuters*. 15 November. Diakses May 24, 2023.
<https://www.reuters.com/world/middle-east/what-is-syrian-kurdish-ypg-2022-11-14/>.
- Phillips, Christopher. 2015. "Sectarianism and conflict in Syria." *Third World Quarterly* 357-376.
- Reese, Aaron. 2013. "SECTARIAN AND REGIONAL CONFLICT IN THE MIDDLE EAST." *Institute for the Study of War* 9-20.
- RI, BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMHAN. 2020. "Kementerian Pertahanan Republik Indonesia." *kemhan.go.id*. 25 November. Diakses March 13, 2023. https://www.kemhan.go.id/badiklat/wp-content/uploads/2021/06/tmp_23263-HANJAR-PROXY-WAR-1197984620.pdf.
- Robinson, Kali. 2022. *Council on Foreign Relations*. 25 May. Diakses March 19, 2023. <https://www.cfr.org/backgrounder/what-hezbollah>.
- Rome, Henry. 2021. *The Iran Primer*. 15 December. Diakses May 17, 2023. <https://iranprimer.usip.org/blog/2021/dec/15/iran-2021-economy>.
- Ruth Sherlock, Scott Neuman, Nada Homsy. 2021. *NPR*. 15 March. Diakses March 15, 2023. <https://www.npr.org/2021/03/15/976352794/syrias-civil-war-started-a-decade-ago-heres-where-it-stands>.
- Saad, Ben Hubbard and Hwaida. 2021. *The Washington Post*. 23 February. Diakses August 20, 2023. <https://www.nytimes.com/2021/02/23/world/middleeast/syria-assad-economy-food.html>.
- SALAMANDRA, CHRISTA. 2013. "Sectarianism in Syria: Anthropologica Reflections." *Middle East Critique* 303-306.
- Sly, Liz. 2019. *The Washington Post*. 16 October. Diakses August 19, 2023. https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/the-hasty-us-pullback-from-syria-is-a-searing-moment-in-americas-withdrawal-from-the-middle-east/2019/10/16/82c0ff3c-ef5a-11e9-bb7e-d2026ee0c199_story.html.
- . 2011. *Washington Post*. 12 November. Diakses April 7, 2023. https://www.washingtonpost.com/world/syria-suspended-from-arab-league/2011/11/12/gIQAvqGxEN_story.html.
- Tan Tan*, Mariia German. 2022. "Russian-Iranian Strategic Partnership in Syria: Converging Interests but Diverging Goals." *Open Journal of Political Science* 1-13.
- Terrill, W. Andrew. 2015. "Iran's Strategy for Saving Assad." *The Middle East Journal* 222-236.
2018. *The Economist*. 28 June. Diakses August 18, 2023. <https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2018/06/28/how-a-victorious-bashar-al-assad-is-changing-syria>.
- Todman, Will. 2016. "Gulf States' Policies on Syria." *Center for Strategic and International Studies (CSIS)* 1-8.
- Tsurkov, Elizabeth. 2021. *The Washington Post*. 1 June. Diakses March 15, 2023. <https://www.washingtonpost.com/politics/2021/06/01/yes-assad-won-reelection-last-week-syrias-elections-serve-another-purpose/>.
- UBRIACO, JULIAN. 2017. "THE MIDDLE EAST'S COLD WAR." *Harvard International Review* 6.

- William Young, David Stebbins, Bryan A. Frederick, Omar Al-Shahery. 2014. *Spillover from the Conflict in Syria: An Assessment of the Factors that Aid and Impede the Spread of Violence*. Research , Santa Monica, California: RAND Corporation.
- Wintour, Patrick. 2017. *The Guardian*. June 5. Diakses April 13, 2023. <https://www.theguardian.com/world/2017/jun/05/saudi-arabia-and-bahrain-break-diplomatic-ties-with-qatar-over-terrorism#:~:text=Saudi%20Arabia%20said%20it%20took,restive%20eastern%20province%20of%20Qatif>.
- WorldBank. 2022. *worldbank.org*. 20 October. Diakses May 26, 2023. <https://www.worldbank.org/en/country/iran/overview#1>.
- Youssef, Fouad Hamdan & Shiar. 2015. *Al Bawaba*. 20 May. Diakses August 18, 2023. <https://www.albawaba.com/news/why-we-shouldn%E2%80%99t-ignore-sectarian-cleansing-syria-697022>.